

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama

Oleh

Monica Martilova
NPM. 1431040085

Jurusan Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**



Pembimbing I : Dr. H. Ali Abdul Wakhid M.Si
Pembimbing II : Drs. Agustamsyah M.IP

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh

MONICA MARTILOVA

Pada tahun 2007 Pemerintah telah menerbitkan Program untuk penanggulangan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa dikenal dengan *Conditional Cash Transfer (CCT)* yaitu bantuan tunai kepada keluarga miskin yang memenuhi persyaratan dengan tujuannya memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Permasalahan dalam penelitian adalah bantuan yang diberikan tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat miskin di Kecamatan Bukit Kemuning sehingga masih banyak terdapat masyarakat menengah kebawah tidak merasakan bantuan PKH banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan namun tidak terdata oleh pihak pusat (BPS/Kemensos).

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara kepada informan yang dipilih dengan *purposive sampling*. Kemudian penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dan teori penanggulangan kemiskinan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang implementasi PKH dan faktor pendukung dan penghambat implementasi PKH di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

Hasil penelitian menunjukkan di Kecamatan Bukit Kemuning PKH sudah berjalan cukup baik dalam artian masih banyak yang harus di perhatikan dan ditingkatkan dalam mekanisme maupun prosedur yang ada, dilihat dari proses kegiatan pertemuan awal, validasi, pembentukan kelompok, pemutahiran data verifikasi komitmen peserta dan penyaluran bantuan telah berjalan sesuai ketentuan. Kemudian beberapa faktor pendukung dalam implementasi program PKH dukungan kelembagaan PKH yang telah berjalan efektif, semangat dan atusias KPM dalam menjalani Program, PKH memiliki kejelasan isi yang memudahkan pendamping dan KPM dalam menjalankan program, Lembaga bayar menyalurkan dana bantuan tepat jumlah dan tepat waktu. Faktor penghambat implementasi PKH di Bukit Kemuning meliputi kendala sumber data yang kurang akurat, sering kali terjadi kecemburuan sosial antara KPM dan masyarakat setempat, rendahnya daya tangkap dari KPM berlatar belakang pendidikan (SD/SMP kurang memahami PKH, akses jalan menuju rumah KPM yang sulit dilalui, masih terdapat saran prasarana fasilitas Pendidikan dan Kesehatan yang belum memadai masih sedikitnya petugas pendamping karena pendamping adalah aktor utama dalam pelaksanaan program PKH.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let. Kol.H. EndroSuratminSukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara**
Nama Mahasiswa : **Monica Martilova**
Npm : **1431040085**
Jurusan : **Pemikiran Politik Islam**
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ali Abdul Wakhid, M.Si
NIP. 197503172003121003

Drs. Agustamsyah, M.IP
NIP. 197801302011012004

Mengetahui
Ketua Jurusan
Pemikiran Politik Islam

Dr. Nadirsah Hawari, M.A
NIP. 197406282008011013



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPTI : IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG
UTARA Disusun oleh: MONICA MARTILOVA, NPM. 1431040085, Jurusan
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (PPI) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama pada Hari/Tanggal: **Senin, 06 Agustus 2018****

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Nadirsah Hawari, M.A

Sekretaris : Angga Natalia, M.I.P

Penguji Utama : Dr. M. Sidi Ritauddin, M.Ag

Penguji Pendamping I : Dr. Ali Abdul Wahid, MSi

Penguji Pendamping II : Drs. Agustamsyah, M.I.P

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama



Dr. H. Arsvad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag

NIP. 195808231993031001

MOTTO

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ

Artinya : “Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal”. (QS. At-Taubah : 129).

Hanya kepada Allah kita berserah diri, bukan pada beratnya ujian hidup, pada rasa cemas atau rasa takut, apalagi pada orang lain. Allah lah yang memberikan kekuatan dan yang paling pantas untuk disembah. Tak perlu takut dalam menghadapi tantangan hidup jika senantiasa berpegang teguh pada Allah dan syariat-Nya

Never give up on what you really want to do. The person with big dream is more powerful than the one with all facts. (Albert Einstein)

Jangan pernah menyerah pada apa yang sebenarnya kamu ingin lakukan. Seseorang dengan mimpi besar lebih bertenaga dari pada orang dengan semua kenyataan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Zulpadli dan Ibunda Azida yang tercinta, yang tersayang yang telah mendidikku dengan penuh kesabaran dan kegigihan sedari kecil hingga dewasa dari lahir sampai sebesar ini serta tak henti-hentinya mendo'akan dan mensupport aku menjadi anak yang sukses dalam mengapai cita-citaku dengan segala do'a ridha dan kasih. Berkat keduanya penulis dapat menyelesaikan kuliah ini penulis berharap semoga skripsi ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk Ayahanda dan Ibunda . Do'a Ibu sepanjang masa thank for everything mam.. dad love you more
2. Kakak tercinta Rudi Des Haryadi dan Adik tersayang Nopita yang telah memberikan do'a serta dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Keluarga besar Kedua orang tuaku khususnya Nyaiku, Bik Neli, Kak Albar, Kak Ari, dan Uncu Ewin Dwi terimakasih untuk kasih sayang, doa, motivasi hidup yang berharga dan support baik moril dan materilnya tanpa kalian semua aku bukan apa-apa. Serta Yaiku dan Nenekku yang sudah bahagia disana.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga.

RIWAYAT HIDUP

Monica Martilova dilahirkan di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 22 Januari 1995 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan yang harmonis Bapak Zulpadli dan Ibu Azida.

Penulis menempuh Pendidikan pertama yaitu di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Darma Wanita Kecamatan Bukit Kemuning pada tahun 2000, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 5 Bukit Kemuning di selesaikan pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 4 Bukit Kemuning selesai pada tahun 2011 lalu melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Abung Barat. Penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Pemikiran Politik Islam dimulai pada Semester 1 T.A 2014/2015. Di UIN penulis aktif dalam organisasi ekstra yaitu Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Ushuluddin dan Studi Agama dan pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Kohati yang pertama kali pada periode 2018-2019. Selama menjadi Mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung penulis pernah mendapatkan Beasiswa Diva pada tahun 2015.

Bandar Lampung, 05 November 2018
Peneliti,

Monica Martilova
NPM. 1431040085

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya sampai hari akhir tiba.

Alhamdulillah berkat rahmat hidayah dan nikmat kemudahan dari Allah SWT, akhirnya peneliti berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya berupa Skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Pemikiran Politik Islam. Keseluruhan penelitian karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini peneliti menghanturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Nadirsah Hawari M.A dan Ibu Tin Amalia Fitri M.Si selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam.
4. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada peneliti sehingga tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Agustamsyah M.I.P selaku Pembimbing II yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam membimbing skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

7. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama atas diperkenalkannya penyusun meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Bapak alex selaku Koordinator Kabupaten Lampung Utara, bapak dedi sualiman selaku Koordinator Kecamatan Bukit Kemuning, bapak Suhada, Ibu Risnani selaku Pendamping PKH dan Peserta PKH serta Perangkat Kecamatan Bukit Kemuning terima kasih telah memberi banyak informasi dan membantu peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman PPI B Argo, Ari, Ariyanto, Deden, Deni, Gobi, Khafiqi, Nurul Azmi, Leo, Siti Maryamah, Tri, Zakiyah dan girl Squad sungguh Allah maha baik telah mempertemukan kita, semoga selalu tetap kompak dan sholid selamanya
10. Teman-teman KKN 04 Karya Tunggal terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat.
11. Girl Squad yang beranggotakan Desti, Rani, Riska, dan Yuni yang telah memberikan semangat dan kebersamaan kalian selama mengerjakan skripsi ini, I proud of you gengs.
12. Partner wara wiri Desi Ratna Sari, Kustirahayu, dan Karmila terimakasih sudah menjadi penghibur penatku.
13. Keluarga besar sehimpun secita yang selalu berjuang dalam satu wadah HMI Komisariat Ushuluddin Dan Studi Agama sebagai rumah kedua
14. Para warga kindekost yosi, selfi, syifa, musri, ida, resti, mas adi terima kasih untuk canda tawanya selama ini.

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 03 Desember 2018
Penulis,

Monica Martilova
NPM.1431040085



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Metode Penelitian	10
H. Tinjauan Pustaka	16

BAB II IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, KEMISKINAN, DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

A. Teori Implementasi Kebijakan.....	19
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	19
2. Proses Implementasi Kebijakan Publik	21
B. Kemiskinan	23
1. Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an.....	23
2. Pengertian Kemiskinan Secara Umum.....	25
3. Bentuk dan Jenis Kemiskinan	28
4. Kriteria Kemiskinan	29
5. Program Penanggulangan Kemiskinan	30
6. Jaminan Sosial : Program Keluarga Harapan	33
C. Program Keluarga Harapan	36
1. Pengertian Program Keluarga Harapan	36
2. Kriteria Penerima Bantuan PKH	41
3. Dasar Hukum PKH	41

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A. Sejarah Pembentukan Kecamatan Bukit Kemuning	44
1. Letak Geografis	45
2. Kondisi Topografis.....	46
3. Lingkungan	48
4. Keadaan Demografi	49
5. Ekonomi Masyarakat	53
6. Visi dan Misi	55

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM PKH

A. Pelaksanaan Program PKH Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara	56
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Program PKH Di Kecamatan Bukit Kemuning	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Informan.....	14
Tabel 2. Luas wilayah berdasarkan lingkung kelurahan	46
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan KK	49
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama	51
Tabel 5. Jumlah Sarana Peribadatan	51
Tabel 6. Jumlah Jiwa Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 7. Jumlah Sarana Pendidikan	53
Tabel 8. Syarat dan Sasarab PKH	60
Tabel 9. Dana Bantuan PKH	69
Tabel 10. Data Peserta Penerima PKH Kecamatan Bukit Kemuning.....	74



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kewajiban Peserta	58
Bagan 2. Mekanisme seleksi data calon KPM	67
Bagan 3. proses pemutakhiran data	76



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara”**

Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap.¹ Dalam *Oxford advance leaner dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah *put something into effect* yang artinya adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak.

Implementasi adalah pelaksanaan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap selesai.²

Program Keluarga Harapan (PKH) yang di laksanakan sejak tahun 2007. PKH sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan

¹E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 93

²Peter, Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kotemporer*, Jakarta, h. 562.

yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai *Conditional Cash Transfer (CCT)* atau program bantuan bersyarat.

Penegasan judul tersebut dapat diperjelas bahwa penelitian ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkapkan dan mengaji secara lebih mendalam tentang aktivitas serta proses yang dilakukan peserta dan petugas PKH dari rangkaian kegiatan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

B. Alasan Memilih Judul

Terbentuknya judul dalam penelitian ini, dikarenakan adanya sebuah masalah sehingga tergerak untuk dilakukan penelitian. Adapun hal-hal menarik atau alasan-alasan penulis dalam memilih judul Proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Kemiskinan merupakan akar permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi namun melibatkan pangan, pendidikan, kesehatan, serta kriminalitas. Hal tersebut butuh penanggulangan yang harus dilakukan dengan cepat sehingga tidak akan merebat ke masalah-masalah yang lain.
- b. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan keluarga yang dinilai kurang mampu berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2. Alasan Subjektif

Dari penelitian ini penulis bermaksud untuk mengaplikasikan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yaitu Jurusan Pemikiran Politik Islam dan data-data mudah di dapat serta cukup tersedia.

C. Latar Belakang Masalah

Program Keluarga Harapan (PKH) digulirkan di Kabupaten Lampung Utara untuk merespons Permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Kecamatan Bukit Kemuning. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di kabupaten Lampung Utara khususnya yang terdapat di kecamatan Bukit Kemuning untuk ikut berperan serta terdapat program PKH yang nantinya akan memberikan Dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menggugil kemiskinan yang selama ini menjerat Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dapat disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam struktur kehidupan bernegara, unit pertama yang dapat membentuk karakter seorang individu ialah keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pertama

yang dapat menentukan perilaku seseorang. Dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan ajang pertama dalam membentuk konsep masyarakat sejahtera.³

Kemiskinan merupakan kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Pendapat konvensional mengkaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai. Untuk membuat mereka berada di atas ambang minimal kategori sejahtera. Kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan suatu jenis konsumsi tertentu. Sebagai contoh, suatu masyarakat dapat dikatakan miskin karena tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk.⁴

Kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik.⁵ Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal penghambat proses pembangunan sebuah negara. Salah satu negara yang kini masih dibelit oleh masalah sosial dan kemiskinan ialah Indonesia. Berdasarkan data BPS pada September 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 10,70 persen (sebanyak 27 764.32 jumlah penduduk). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,73 persen pada September

³ Azumardi Azra, *pendidikan Islam Tradisional dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta : Logos 1999) h. 3

⁴ Jonathan Haughton dan Shahidur R. Khandker, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012) h. 1.

⁵ Bambang rustanto, *Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: STKPRESS Bandung, 2014), h. 9.

2016. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 13,96 persen pada September 2016.⁶

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Namun, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah memurukkan Indonesia ke dalam kemiskinan yang lebih serius dan berakibat pada penurunan kualitas kehidupan masyarakat seperti rendahnya tingkat kesehatan, penurunan gizi, dan keterbelakangan pendidikan.⁷

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait dengan usaha-usaha pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan setumpuk gunung es yang harus dipecahkan. Fenomena-fenomena tersebut sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain. Para pemerhati sosial, politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan keprihatinannya, mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius para pemangku kebijakan maka fenomena tersebut akan membawa bangsa dan negara kehilangan arah dan rakyat akan semakin tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi.⁸

Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No, 40 Tahun 2004

⁶BPS Indonesia, *Kemiskinan*, www.bps.go.id diakses tanggal 1 maret 2018

⁷ Jurnal Dialog Kebijakan Publik, *Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respons Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya*, (Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 8, Desember 2012) h. 11.

⁸ Wisnu Indrajid VO Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat da Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutuskan Mata Rantai Kemiskinan)*. (Malang Intrans Publishing, 2014), h.25

tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Perpers Nomor 15 Tahun 2010 percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Bahkan dalam alquran dianjurkan untuk menyantuni anak yatim dan orang miskin seperti disebutkan dalam QS. Al-Ma'un:



أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

Artinya : “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin, Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya, Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”

Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kabupaten Lampung Utara dikeluhkan masyarakat. Pasalnya pasca perubahan melalui validasi yang dilakukan oleh para pendamping menuai kritik dari warga karena dinilai tidak tepat sasaran. Warga kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, kecewa dengan data calon penerima bantuan tunai Program Keluarga Harapan

(PKH) yang baru. Warga menilai calon penerima PKH yang diundang ke kecamatan oleh petugas dari kementerian sosial.

“Yang kami pertanyakan, siapa yang mendata, tiba-tiba ada warga yang diundang ke kecamatan, katanya akan dapat PKH” ujar Annisa (35 tahun), ibu rumah tangga setempat.⁹

Dia mengatakan secara kasat mata sebagian besar calon penerima PKH bukan berasal dari keluarga tidak mampu. Padahal masih banyak warga yang dikategorikan keluarga tidak mampu namun tidak dapat bantuan pemerintah. Pihak kelurahan Bukit Kemuning mengakui tidak dilibatkan dalam pendataan penerima bantuan PKH. Data penerima ditentukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara merupakan lokasi yang di jadikan objek dalam tulisan ini. Adapun sasaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi Kecamatan Bukit Kemuning Petani, Pedagang, dan Buruh yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakatnya yang masih banyak keluarga miskin.

Sebanyak 23,28 persen atau 139.422 dari 598.892 total penduduk Lampung Utara masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka penduduk miskin ini berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten ini mencapai sekitar 23 persen dari total penduduk menjadi perhatian utama Pemkab saat ini. Kabupaten ini berharap Program pengentasan kemiskinan yang akan segera dirumuskan Pemkab itu akan dapat

⁹Wawancara dengan ibu Annisa ibu rumah tangga warga Bukit Kemuning yang mendapat bantuan PKH

mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin sehingga dapat bermuara pada menurunnya jumlah penduduk miskin di Lampung Utara.

PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran. Verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat. Program Keluarga Harapan sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi, istilah aslinya *Conditional Cash Transfer* (CTT) yang diterjemahkan menjadi Bantuan Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu masyarakat miskin.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian Skripsi ini adalah untuk mengetahui :

- a. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.
- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses implementasi Program Keluarga di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan wacana ilmu politik di bidang kebijakan publik.
 - b. menjadi bahan informasi mahasiswa Khususnya di bidang prodi Pemikiran Politik Islam, Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang politik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan program berikutnya dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

- b. Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹⁰ Untuk mencapai hal tersebut maka dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode yang sesuai, hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Metode penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat.¹¹ Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data, informasi dan permasalahan yang ada di lapangan terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

¹⁰Usman Husain, Purnomo Stiady, Amar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta Bumi Aksara, 2001, h. 42

¹¹Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) h. 1.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan atau kelompok tertentu.¹² Penelitian ini hanya menggambarkan dan mengemukakan yang terjadi pada objek sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang kebijakan publik melalui Program Keluarga Harapan yang dilakukan di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

2. Sumber Data

Proses penelitian kualitatif lebih mementingkan kualitas data dan proses kegiatan objek yang diteliti. Oleh karenanya memerlukan sumber data yang benar-benar memahami masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹³ Dalam hal ini penulis menjadikan Dinas Sosial sebagai pengawas program PKH, Pendamping/Koordinator sebagai pelaksana program PKH, Masyarakat sebagai peserta penerima bantuan program PKH di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara.

b. Data Sekunder

¹²Mely G. Tan, *Masalah Perencanaan Penelitian dalam Koetjaraningrat* (Jakarta: PT media Pustaka Utama. 1990) h. 29

¹³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta) h. 38

Data sekunder merupakan data pendukung yang fungsinya memperkuat data primer. Data diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan peneliti terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.¹⁴

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat Kecamatan Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara ± 41.105 jiwa penduduk dari 1 Kelurahan 8 desa 14 Lingkungan.

b. Sample

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁶ Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah dalam melaksanakan penelitian, atau dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Teknik penentuan sampel yaitu teknik penentuan sampel yang digunakan dalam

¹⁴Kaelan, M. S., *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005) h. 73.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998, h. 115.

¹⁶Soeratno dan Lincollin Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Lima*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008) h. 83.

penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penentuan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut :

1. Koordinator Kabupaten dan Koordinator Kecamatan 2 orang PKH
2. Pendamping di Kecamatan Bukit Kemuning sejumlah 4 orang
3. Peserta penerima PKH di kelurahan Bukit Kemuning sejumlah 14 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini ada 3 cara yaitu:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengajuan secara intensional atau bertujuan suatu hal, khususnya untuk pengumpulan data dan merupakan suatu verbalisasi mengenai hal-hal yang diamati.¹⁷ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap lembaga tersebut, penulis mendatangi Kecamatan Bukit Kemuning, Kantor Sekretariat PPKH Kecamatan Bukit Kemuning dan kediaman Koordinator, Pendamping serta Peserta PKH.

b. Metode Wawancara

Interview yang sering juga di sebut wawancara Kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang di lakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi oleh responden dan informan. Penulis menggunakan *interview* terpimpin, yaitu *interview* yang di lakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan

¹⁷*Ibid.*, h. 157.

pernyataan lengkap dan terperinci seperti yang di maksud dalam interview terstruktur.¹⁸Penulis melakukan tanya jawab kepada Koordinator, pendamping dan masyarakat yang menjadi peserta program keluarga harapan. Untuk lebih mengetahui tentang implemantasi tentang pelaksanaan dari program keluarga harapan di kecamatan bukit kemuning kabupaten lampung utara. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 1.
Informan penelitian

No	Nama	Jenjang pendidikan	Jabatan
1.	Alexander	S1 Fisip Unila	Koordinator PPKH
2.	Dedi sulaiman	S1 Uin Raden Intan Lampung	Koordinator Kecamatan Bukit Kemuning
3.	Risnani	S1 STKIP Bandar Lampung	Pendamping
4.	Suhada	S1 Fisip Unila	Pendamping
5.	Nisar	SMP	Peserta PKH
6.	Rika	SMA	Peserta PKH
7.	Lespita	SMA	Peserta PKH
8.	Mujiati	SMP	Peserta PKH
9.	Asmawati	SMP	Peserta PKH
10.	Sudarti	SMA	Peserta PKH
11.	Sanawati	SMP	Peserta PKH

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Prakter*, (Jakarta:PT.RinekaCipta, 1998)h. 145-146.

Dengan wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih lanjut mengenai informasi yang sesungguhnya tidak tampak jika hanya dilakukan observasi semata, dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai yang ikut berperan dalam penaruh perilaku politik masyarakat. Penentuan jumlah wawancara ditentukan berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang mempunyai pengaruh terhadap objek yang akan diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.¹⁹ Yang penulis kumpulkan, yaitu seperti arsip-arsip tentang kegiatan program keluarga harapan di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

5. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian karya ilmiah ini adalah analisa data kualitatif karena pendekatan kualitatif sangat menarik, sebab penulis langsung ikut serta di kegiatan yang sedang diteliti, data yang dikumpulkan berupa konsep dan bukan angka yang bertujuan untuk memudahkan dan memahami data-data yang ditetapkan dalam penelitian.²⁰ Setelah melakukan analisa data, maka langkah selanjutnya penulis menarik kesimpulan kualitatif

¹⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1998, h. 133.

²⁰Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1997, h. 269.

dengan mempergunakan cara berfikir induktif menarik kesimpulan dari khusus ke umum.²¹

Data yang akan dianalisis merupakan data kualitatif dan cara menganalisisnya menggambarkan kata-kata atau kalimat sehingga dapat disimpulkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berfikir induktif, untuk menarik kesimpulan dari data yang di peroleh yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian di tarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa peneliti terdahulu yang penulis temukan, terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung”* yang di tulis oleh Cita Fauzila Akmala, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta 2017 Skripsi ini menyoroti tentang kemiskinan yang perlu di perhatikan pemerintah di kelurahan kranggan yaitu kemiskinan yang berbentuk absolut, Bantuan PKH di kelurahan Kranggan berupa uang tunai, motivasi dan dorongan untuk membuat usaha.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1985, jilid I, h. 143.

2. Skripsi yang berjudul *“Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)”* yang di tulis oleh Karyawati, Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017, Skripsi ini menyoroti tentang tidak tepatnya penentuan RTM penerima bantuan oleh pihak pengelola dalam mengelola)/mengalokasikan dana PKH yang diterima. sehingga PKH yang sudah berjalan selama empat tahun di Kampung Bonglai masih kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan.
3. Skripsi yang berjudul *“Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga (Studi Kasus Program Keluarga Harapan Di Jakarta Barat)”* yang di oleh Erfan Ma’ruf, Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2017 skripsi ini menyoroti tentang bagaimana program keluarga harapan diimplentasikan di jakarta barat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
4. Slamet Riyadi (2016), dalam tesisnya yang berjudul *“ Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) penerima Bantaun (studi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”* mengemukakan bahwa: PKH yang mengkombinasi skema bantuan tunai dengan prasyarat berupa komitmen kehadiran peserta PKH pada Fasdik dan Fakes, adanya mekanisme pendampingan yang intens oleh petugas,

pertemuan kelompok KSM, menunjukan hasil positif di bandingkan bantuan langsung tunai tanpa prasyarat.

Penelitian yang penulis lakukan sangat berbeda dengan ketiga peneliti di atas, penulis lebih memfokuskan bagaimana pelaksanaan program PKH memberikan bukti nyata dalam pelaksanaan program PKH di Kecamatan Bukit Kemuning, berlakukannya PKH pada setiap wilayah tentu memiliki pengaruh yang berbeda-beda khususnya di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara terkait dengan pembiayaan maupun pencapaian tujuan program tersebut.



BAB II

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, KEMISKINAN DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

A. Teori Implentasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Webster dalam Wahab sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo implementasi diartikan sebagai “*to provide The means for carrying out*” (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effects to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.²²

Menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan penelitian. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/menagatur proses implentasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan

²²Joko Widodo, *Analisis Kebijakan publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Sidoarjo: Bayumedia publishing, 2006), h. 86.

dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (*instansi*) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang mengambil keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang peraturan-peraturan yang bersangkutan.²³

Sedangkan Menurut Pressman dan Wildavsky, sebagaimana dikutip oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).²⁴

Berdasarkan beberapa pendapat diatas yang mendefinisikan implementasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), proses tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

²³*Ibid.*, h. 88

²⁴Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gava Media, 2012), h. 20

2. Proses Implementasi Kebijakan Publik

1. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Aktivitas interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholders*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi. Tidak saja mereka yang tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi.

2. Tahapan Pengorganisasian (*to Organize*)

Tahapan Pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya), penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlakukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan). Penetapan prasarana dan sarana (apa yang diperlukan untuk melaksanakan

kebijakan), penetapan tata kerja, dan penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

a. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada jenis apa yang dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dinas, Badan, Kantor, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah
2. Sektor Swasta
3. Komponen Masyarakat
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Penerapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

b. Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan *Standar Operating Procedure*(SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Kemiskinan

1. Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an

Kata miskin didalam Al-Quran biasa digandengkan dengan kata *faqir*.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, miskin diartikan tidak berharta benda serba kekurangan (berpenghasilan rendah), sementara fakir mempunyai arti orang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin.²⁵ Ada pun beberapa ayat-ayat al-Quran menegaskan tentang kata fakir dan miskin, di antaranya adalah ayat 79 surat Al-kahfi :

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

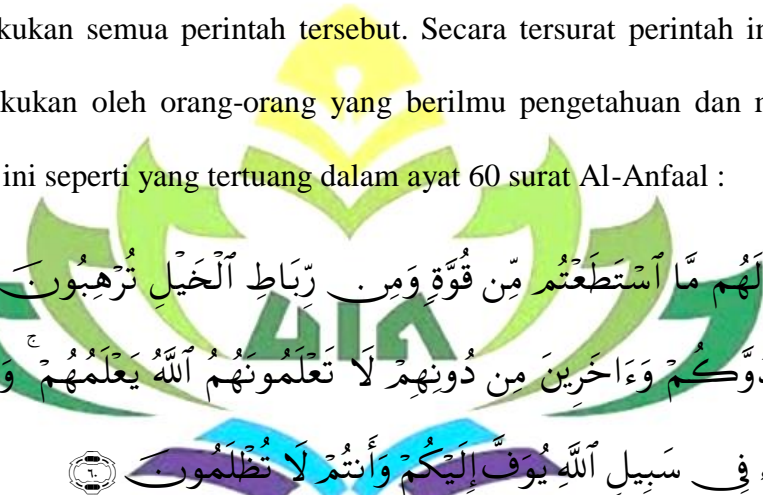
Artinya : “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.” (Q.S. Al-Kahfi :79)

Ayat ini menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Di samping itu dari asal kata *faqir* adalah isim fa'iil yang bermakna *maful*, yaitu orang yang patahkan tulang rusuknya. Sedangkan kata miskin terambil dari kata *as-sukun* (diam atau tenang) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang patah tulang rusuknya lebih parah keadaannya orang yang diam (tidak bekerja). Orang-orang tersebut yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri mereka

²⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bangsa *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta:Balai Pustaka,1999) h. 660.

dari kejahatan raja alim, yang telah merampas setiap bahtera yang tampak. Jadi, tentu saja bahtera itu bukanlah milik orang miskin yang tidak memiliki harta.

Pada dasarnya Islam tidak mentolerir segala bentuk kemiskinan bagi para pemeluknya. Islam memerintahkan dengan tegas supaya umatnya berzakat, berinfaq, membiayai peperangan itu sendiri, diperintahkan untuk menjalankan haji dan sebagainya. Bagaimana mungkin, orang-orang miskin bisa melakukan semua perintah tersebut. Secara tersurat perintah ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan dan memiliki harta. Hal ini seperti yang tertuang dalam ayat 60 surat Al-Anfaal :



وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ
اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya : *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Q.S. Al-Anfaal : 60).*

Dapat ditarik benang merahnya dari ayat di atas bahwa ajaran Islam itu mendorong masyarakatnya untuk memiliki harta kekayaan dalam menghadapi musuh Islam. Kemiskinan adalah musuh besar umat Islam, mereka berkewajiban melawan kemiskinan yang menderanya. Allah SWT. tidak

pernah memerintahkan penganutnya menjadi orang miskin, di dalam Al-Qur'an tidak satu pun ayat yang ditemukan perintah kepada umat Islam menjadi miskin. Allah maha penyayang, Dia akan membantu umatnya keluar dari segala kesulitan.²⁶

2. Pengertian Kemiskinan Secara Umum

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.²⁷ Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.²⁸

Kemiskinan (*poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhanpun tidak sebanding. Istilah ini artikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik.²⁹ Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya

²⁶Jafri Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, (Jakarta, Gramata Publishing, 2010) h. 5.

²⁷Mudrajat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: YKPN, 2002) h. 112

²⁸Chiswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan secara Multidimensional*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, h. 112.

²⁹Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h. 185

pembangunan.³⁰ Dari banyaknya definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi kemiskinan yang di kemukakan oleh Chambers dan definisi tersebut yang saat ini mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang. Chambers menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

a. Kemiskinan (*Proper*)

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

b. Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

³⁰Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005) h. 98-99.

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of Emergency*).

Seseorang atau sekelompok orang yang di sebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

d. Ketergantungan (*Dependence*)

Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak yang lain adalah sangat tinggi.

e. Ketersaingan (*Isolation*)

Dimensi ketersaingan yang dimaksud oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.³¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu :

1. Melakukan kegiatan usaha produktif,
2. Menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi
3. Menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif

³¹Rulan Ahmadi, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (Studi Layanan Publik Tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin Yang Diselenggarakan Oleh BPM-KB Dan Posko 100 Di Kota Surabaya)* Jurnal Administrasi Publik Vol. 10, No. 2 (Desember 2012), h. 12

4. Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

3. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan 4 bentuk yakni sebagai berikut:

a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.³²

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

³² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung Refika Aditama, 2005) h. 170-180

- c. Kemiskinan Kultural Kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos, kemajuan masyarakat modern.
- d. Kemiskinan Stuktural

Kemiskinan stuktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.³³

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan bisa terjadi oleh sebab alamiah dan buatan. Seperti yang terjadi pada lokasi penelitian ini, dimana kemiskinan terjadi oleh sebab alamiah yang pada dasarnya masyarakat tersebut sudah terlahir sebagai keluarga miskin, namun uang memperparah keadaan adalah dimana masyarakat tidak mendapat sarana ekonomi secara merata.

4. Kriteria Kemiskinan

Berdasarkan studi SMERU, Suharto menunjukan sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)
- b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental

³³Michael P. Todaro dan Sthepan C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Erlangga, 2003) h. 247.

- c. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan)
- d. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- e. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak terlantar, wanita tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil)
- f. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset) maupun misal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum)
- g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan
- h. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi)
- i. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat).³⁴

5. Program Penanggulangan Kemiskinan

Program penangugulangan kemiskinan, yaitu kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil.

³⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung Refika Aditama, 2005) h.57

Salah satu program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah yaitu PKH. Program Keluarga Harapan adalah program bantuan tunai bersyarat untuk pemberdayaan bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki satu atau beberapa komponen PKH.

1. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan Menurut Ide sebagaimana di kutip oleh Suharto menjelaskan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Sedangkan menurut rappaport sebagaimana dikutip oleh Suharto menjelaskan Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.³⁵

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.³⁶

³⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung Refika Aditama, 2005) h. 59.

³⁶Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2007) h. 42.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun secara kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis
- b. Kelompok lemah khususnya, seperti manula, anak-anak, dan remaja, penyandang disabilitas, gay, dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.³⁷

2. Cas Trasfer/ Bantuan Langsung Tunai

Bantuan langsung tunai yaitu program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau lainnya baik bersyarat maupun tidak bersyarat yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Pemerintah menyelenggarakan program BLT bersyarat dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat mereka harus menyekolahkan anaknya dan melakukan cek kesehatan rutin. Target utama dari program ini adalah keluarga miskin dengan anak berusia 0 sampai 21 tahun, ibu hamil/nifas,

³⁷*Op.cith.* 60

lansia 70 tahun ke atas dan disabilitas berat. Dana tunai akan diberikan kepada keluarga pendaftaran selama enam tahun.³⁸

6. Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan

Jaminan sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, mencakup sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi sosial seperti kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-anak dan lain-lain.

Dalam Islam jaminan sosial berasal dari kata *takaful* yang menunjukkan makna “pengharusan” dan “tanggung jawab”, karena *takaful* merupakan bentuk interaktif dari kata *kafala*. Dikatakan, *takaffaltu bisy sya’I*, artinya aku mengharuskan diriku kepadanya, dan aku akan menghilangkan darinya ketelantaran. Sedangkan kata sosial disebutkan dalam Islam dengan kata *ijtima’I* yang berarti masyarakat. Maksudnya, perkumpulan sekelompok manusia yang dipadukan oleh satu tujuan.³⁹

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jaminan sosial itu berarti, “tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka,

³⁸<https://lutfianto22.wordpress.com/bantuan: langsung-tunai/di> akses pada tanggal 8 Agustus 2018.

³⁹Jaribah al-Haritsi, *Al-fiqh Al-iqtishadi Li Amirul Mukminin Umar Ibnu Al-Khatthab Diteremahkan Oleh Asmuni Shalilah Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar Ibnu Al-Khatthab* (Cet.3; Jakarta Timur: Khalifa, 2010), h. 285

memperhatikan mereka dan menghindarkan keburukan dari mereka. Namun, harus diingat jika membahas takaful dalam islam adalah bahwa takaful mencakup orang yang membutuhkan yang telah mengerahkan segala upayanya tetapi tidak bisa merealisasikan kecukupannya. Sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa islam mendukung para penganggur dan orang-orang yang malas bekerja.⁴⁰ Atas dasar tersebut, maka terminologi jaminan sosial mengandung beberapa makna, diantaranya adalah (1) keharusan, (2) tanggung jawab kolektif dalam penjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari jamaah ke individu atau dari individu terhadap jamaah, (3) keluasan cakupannya terhadap semua sisi kehidupan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan.

Takaful merupakan tanggung jawab masing-masing individu, masyarakat dan pemerintahan sebagaimana yang di jelaskan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab individu

Tanggung jawab individu yang diemban oleh seseorang yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang yang dia wajib nafkahi seperti kerabat dan orang sekitar mereka yang membutuhkan. Hal tersebut terkait dengan tolong-menolong yang di sebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٢﴾

⁴⁰Ibid

Artinya :*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

2. Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab ini adakalanya secara langsung, yaitu dengan merealisasikan kecukupan dari Baitul Mal terhadap orang-orang yang tidak mampu dan terkadang tidak langsung, yaitu yang mewajibkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang yang membutuhkan.

3. Tanggung Jawab Masyarakat

Sesungguhnya hukum yang asal bahwa pemerintah mencerminkan masyarakat dalam merealisasikan jaminan sosial. Akan tetapi jika pemerintahan tidak dilaksanakan hal tersebut karena suatu sebab, maka masyarakat mengemban tanggung jawab tersebut secara langsung. Dimana tanggung jawab ini menjadi fardu kifayah.

Salah satu kebijakan dalam hal sosial yang dilakukan pemerintah di Indonesia adalah program keluarga harapan. Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) guna terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Bantuan Tunai Bersyarat atau disebut *Conditional Cash Transfer (CCT)*, telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menaggulangi kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara yang melaksanakannya.

C. Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) tidaklah sama dan bukan pula merupakan lanjutan program Programm Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga harapan (PKH) lebih dimaksud sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.⁴¹

Al-Qur'an mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi menaggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Secara tegas Al-Qur'an mencap mereka yang enggan berparisipasi (walau dalam bentuk minimal) sebagai orang yang telah mendustakan agama seperti yang tertuang dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya : ”Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.”

Di dalam ayat tersebut secara tegas islam menyatakan bahwa orang-orang miskin dan anak yatim mesti diberikan santunan. Namun arti sesungguhnya dari

⁴¹Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementrian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi,2013), h.1

ayat tersebut adalah bahwa umat islam yang hidupnya berkecukupan secara materi dan akhirnya mampu menjalankan perintah agama secara tenang.

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.⁴²

Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium atau MDGs (*Millenium Development Goals*). Setidaknya ada lima komponen tujuan MDGs yang di dukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.

Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya, khususnya kewajiban yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kewajiban di bidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita sehingga dapat mengurangi angka

⁴²*Ibid.*

kematian ibu dan angka kematian balita sesuai program prioritas dalam pencapaian indikator MDGs.⁴³

Di bidang pendidikan, peserta PKH memiliki kewajiban terkait dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar, lanjutan dan menengah (SD sampai dengan SMA) termasuk anak dengan disabilitas, selain mendaftarkan peserta didik, peserta didik yang termasuk anggota PKH tersebut harus memenuhi jumlah kehadiran yang ditetapkan dalam program yaitu minimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan, dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat.⁴⁴

Program keluarga harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan *income effect* kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (*insurance effect*).

Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya

⁴³Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberian Pelayanan Kesehatan*, h. 1.

⁴⁴*Op.cit*

penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat rendah sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan dan bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi.

Rendahnya kondisi kesehatan keluarga miskin juga berdampak pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun. Pada tahun 2003 misalnya, angka kematian balita pada tingkat pendapatan terendah adalah 77% per 1000 kelahiran hidup. Gizi kurang berdampak buruk pada produktivitas dari daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkan kelompok ini terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk. Seringnya tidak masuk sekolah karena sakit dapat menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang buruk juga menyebabkan mereka tidak dapat berprestasi di sekolah.⁴⁵

Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin, ada juga yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, namun masih banyak anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan (SMP/Mts) apalagi ke jenjang menengah atas (SMA). Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

⁴⁵ *Op.cit h. 4*

Dari sudut pandang kebijakan, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM memenuhi kewajibannya di bidang kesehatan dan pendidikan akan membawa perubahan perilaku KPM (keluarga penerima manfaat) terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan.

Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan harus bisa dibuktikan secara empiris. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga akan diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang anggarannya bersumber dari APBN, dan melibatkan berbagai sektor yang didalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen/Lembaga meliputi: Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TN2PK, BPS dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Keuangan dalam penyaluran bantuan bagi peserta PKH.⁴⁶

2. Kriteria Penerima Bantuan PKH

Peserta PKH adalah keluarga penerima manfaat (KPM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:⁴⁷

⁴⁶*Ibidh.* 12

⁴⁷Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed Revisi, 2013), h.12.

A. Kriteria kategori kesehatan meliputi :

1. Ibu hamil/menyusui/ibu nifas/anak balita
2. Memiliki anak usia 0-5 tahun 11 bulan

B. Kriteria kategori pendidikan meliputi :

1. Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
2. Memiliki anak SMP/MTs/Paket B/ SMLB (usia 12-15 tahun)
3. Memiliki anak SMA/MA atau sederajat

C. Kriteria kategori kesejahteraan sosial meliputi :

1. Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh tahun)
2. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

Ketiga Kriteria Penerima Bantuan PKH tersebut hanya harus terpenuhi salah satu atau lebih. Namun bukan berarti setiap keluarga yang dianggap sangat miskin yang memiliki salah satu atau lebih kriteria tersebut berhak mendapat bantuan PKH. Jika sebelumnya mereka tidak masuk dalam daftar calon penerima PKH, maka mereka tidak akan divalidasi.

Perbedaan kriteria kategori akan berpengaruh pada besar bantuan PKH yang diterima. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kriteria kategori A dan/atau B saja, untuk 2017 ini besar bantuannya adalah Rp. 1.890.000 per tahun, sedangkan untuk KPM PKH yang memiliki kategori C besar bantuan mencapai Rp.2.000.000 per tahun, pada setiap tahun data akan selalu berubah begitupun besar bantuan PKH yang akan diterima KPM ditahun seterusnya.⁴⁸

3. Dasar Hukum PKH

Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah:

1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang kesejahteraan Sosial. Pasal 19: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan

⁴⁸ Berita PKH, Kriteria Penerima Bantuan PKH Program Keluarga Harapan, Sabtu 17 Mar 2018.

kegiatan yang dilakukan teradap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.

2. Undang-Undang nomor 13 tahun 2011, tentang penanganan fakir miskin
Pasal 3 : “Fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya”. Pasal 15 : “Pemerintah dan pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan”. Pasal 16 : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 12 ayat 2-4: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai diatur dalam Peraturan Presiden”. Pasal 13 : “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi dan fan menggunakan data yang di tetapkan olen intansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

4. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparasi Penyaluraan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan.
5. Inpres nomor 3 tahun 2010, tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
6. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, percepatan Penanggulangan Kemiskinan.



BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A. Sejarah Singkat Kecamatan Bukit Kemuning

Sehubungan dengan telah dibangunnya jalan raya pada tahun 1930 yang menghubungkan antara keresidenan Lampung dengan keresidenan Palembang dan Bengkulu.⁴⁹ Pemerintah memandang perlu pada titik persimpangan jalan raya tersebut untuk dibangun satu desa, yang oleh kepala (persirah) rombongan bekas penggarapan lahan yaitu Hi. Kontar dengan rekan-rekannya sebagai pelopor pembangunan desa.

Pada saat pendirian desa, status pemerintahan masih bergabung dengan Desa Ulak Rengas pada tahun 1938 telah diakui dan disahkan oleh pemerintah dengan status kampung dan diangkatlah Hi Kontar sebagai Kepala Kampung. Setelah ditetapkan lokasi desa pada waktu mengerjakan jalan memasuki desa, maka ditemukan sebuah bukit yang di atasnya terdapat pohon kemuning (tepatnya di depan rumah Bapak Mantri Hamid mantan Dinas Kesehatan). Maka timbullah pemikiran untuk memberi nama kampung/desa yang baru ini bernama Bukit Kemuning. Dengan persetujuan pemerintah Jepang pada tahun 1944 dibentuklah Kemuning. Dengan persetujuan pemerintah Jepang pada tahun 1944 dibentuklah Kecamatan Bukit Kemuning yang meliputi Rebang Seputih yang ibukotanya di desa Bukit Kemuning yang di kepalai oleh seorang Fuku Chunnoho (istilah

⁴⁹Sumber data Kecamatan Bukit Kemuning 2016.

Jepang) setara dengan Camat pada tahun 1954 Marga Rebang Seputih dibentuk kembali menjadi Negeri Semendo Abung yaang dikepalai oleh seorang Kepala Negeri yang bernama Abu Bakar Sidiq.

Kemudian pada tahun 1958 sampai tahun 1962 diganti oleh Aziz Kontar sampai pembubaran kenegerian pada tahun 1974. Semula Kecamatan Bukit berjumlah 9 desaa, dan selanjutnya pada tahun 1972, mengadakan pemekaran sehingga menjadi 18 (delapan belas) desa/kampung dan dimekarkan kembali menjadi dua Kecamatan yaitu : Kecamatan Bukit Kemuning dan Kecamatan Tanjung Raja, dan pada tahun 2001 Kecamatan Buking sebagai Kecamatan Induk terdiri dari 7 desa 1 Kelurahan).

1. Letak Geografis

Secara Geografis wilayah Kecamatan Bukit Kemuning merupakan salah satu bagian dari wilayah kabupaten Lampung Utara yang terletak di jalur lintas sumatera dengan posisi 140^0 bujur Timur dan 445^0 lintang Selatan. Luas wilayah 11.498 Ha dengan batas-batas:⁵⁰

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gunung Labuhan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Abung Tinggi.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Tanjung baru Timur.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Way Kanan.

Penduduk Desa Bukit Kemuning terdiri dari berbagai macam suku, yaitu Suku Semendo, Ogan, Jawa, Sunda, Padang, Lampung dan Batak. Mata

⁵⁰ Sumber data Kecamatan Bukit Kemuning 2016.

pencabarian penduduk mayoritas pada sektor pertanian dan perdagangan. Secara topografis wilayah Kecamatan bukit sebagian besar daerahnya merupakan daerah tinggi. Iklim Kecamatan Bukit Kemuning dapat di kategorikan iklim sejuk.⁵¹ Adapun luas wilayah Kecamatan Bukit Kemuning terbagi dalam 14 lingkungan dengan masing-masing luas Wilayah Keluaran Bukit Kemuning sebagai berikut:

Tabel 2. Luas wilayah berdasarkan lingkung kelurahan

No	Lingkungan	Luas wilayah
1	Luas wilayah I	1.57 KM ²
2	Luas wilayah II	1.48 KM ²
3	Luas wilayah III	1.37 KM ²
4	Luas wilayah IV	1.19 KM ²
5	Luas wilayah V	1.05 KM ²
6	Luas wilayah VI	1.26 KM ²
7	Luas wilayah VII	1.05 KM ²
8	Luas wilayah VIII	0.98 KM ²
9	Luas wilayah IX	1.06 KM ²
10	Luas wilayah X	1.15 KM ²
11	Luas wilayah XI	1.07 KM ²
12	Luas wilayah XII	1.68 KM ²
13	Luas wilayah XIII	1.47 KM ²
14	Luas wilayah XIV	0.52 KM ²
JUMLAH		17.0 KM ²

2. Kondisi Topografis

Secara topografis, Kecamatan Bukit Kemuning 80% adalah dataran tinggi dan sedang, dimana kondisi ini di manfaatkan oleh mayoritas penduduk untuk

⁵¹ Buku Monografi Kecamatan Bukit Kemuning Tahun 2005, h. 5

lahan perkebunan dan pertanian. Selebihnya adalah untuk persawahan dan budidaya ikan air tawar serta perdagangan dan home industri.

1. Potensi

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Kecamatan Bukit Kemuning terdiri berbagai suku dan latar belakang kemampuannya dengan basis pendidikan sebagai berikut :

- 
1. Tamatan SD/ sederajat : 58,97%
 2. Tamatan SMP/ sederajat : 29,63%
 3. Tamatan SLTA/ sederajat : 10,50%
 4. Tamatan Perguruan Tinggi : -

b. Sumber Penghasilan

1. Pertanian/ Perkebunan

Masyarakat Kecamatan Bukit Kemuning pada umumnya terutama yang berada di wilayah pedesaan adalah bertani dan berkebun, baik itu peladangan, sawah, sayur mayur, kebun kopi, kakau dan karet.

2. Perternakan/ Perikanan

Untuk menopang pendapatan keluarga baik yang bersifat harian, mingguan maupun bulanan, masyarakat Kecamatan Bukit Kemuning juga berternak baik itu ayam, kambing, sapi, dan kerbau, demikian juga di sektor perikanan terutama di daerah areal persawahan juga dilakukan secara

tumpang sari secara bersamaan berternak ikandan sawah serta ada pula yang secara khusus usaha tambak ikan yang berdekatan dengan lokasi sawah. Namun hai ini belum terkelola secara maksimal karena perlunya pendampingan tenaga ahli baik dalam hal pembiakan ternak maupun pemijahan ikan.

3. Perindustrian

Khusus untuk industri hanya terdapat beberapa pengrajin rumah tangga (home industri) dan masyarakat pengrajin tersebut sebagian telah menerima pembinaan baik yang fasilitas oleh Dinas Koperindag maupun Badan PMPD Provinsi/ Kabupaten. Adapun home industri yang bergerak diantaranya adalah: gilingan padi, gilingan kopi, industri tahu,tempe, jamur tiram pembuatan arang, bata dan batako. Selebihnya adalah bergerak dibidang perdagangan, pertukaran dan tenaga kerja buruh.

2. Lingkungan

Dengan kondisi luas wilayah ibu Kota Kecamatan Bukit Kemuning secara keseluruhan + 925 Ha, dan dengan ditopang oleh keberadaan Pasar Inpres pada Kecamatan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penataan kebersihan lingkungan menjadi prioritas utama, sejauh ini untuk mengatasi persoalan dimaksud, oleh pihak Dinas Tata Kota telah diberikan bantuan sarana mobilitas yaitu 1 (satu) unit mobil dumptruck yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan kelompok Lembaga Masyarakat, namun karena volume pembangunan sampah baik yang bersumber dari pasar maupun anggota masyarakat yang begitu tinggi,

sehingga secara keseluruhan belum dapat diakomodir dan berakibat masih sering terjadi penumpukan disembarang tempat, demikian pula dari kesadaran masyarakat dalam hal pembangunan sampah masih sangat minim.

Pada aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah lahan/lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) beserta pengelolaannya belum ada kejelasan status tanah tempat pembuangan sampah dimaksud, demikian pula sarana mobilitas idealnya ditambah 2 (dua) unit dumptruck untuk pengangkutan sampah.

3. Keadaan Demografis Kelurahan Bukit Kemuning

Berdasarkan data monografis kecamatan Bukit Kemuning bulan Juni 2010 tercatat ada 18.129 jiwa yang mendiami kecamatan Bukit Kemuning dengan persentase antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Kecamatan Bukit Kemuning mempunyai jumlah penduduk mempunyai jumlah penduduk pertahun 2010 sebanyak 18.129 jiwa. Jumlah laki-laki 9,163 jiwa dan perempuan 8.966 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) 4.157 KK dengan perincian data sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan KK

No.	Lingkungan	KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	338	827	780	1.607
2	II	452	903	901	1.804
3	III	433	905	894	1.799
4	IV	362	862	829	1.691
5	V	261	738	728	1.466
6	VI	469	935	953	1.888

7	VII	325	773	782	1.555
8	VIII	443	928	925	1.853
9	IX	246	699	782	1.379
10	X	167	397	382	779
11	XI	133	259	254	513
12	XII	141	277	358	535
13	XIII	223	362	346	708
14	XIV	164	298	254	552
	Jumlah	4.157	9.163	8.966	18.129

1. Keadaan Sosiologis

Masyarakat (warga) yang mendiami Kecamatan Bukit Kemuning, umumnya adalah masyarakat transmigran seperti halnya masyarakat kota heterogen yang mana didalamnya terdiri dari berbagai macam suku. Suku yang mayoritas mendominasi adalah Suku Sunda mereka berasal dari daerah Jawa Barat dan Suku Semendo berasal dari daerah Sumatera Selatan. Adapun suku-suku yang minoritas adalah Ogan, Jawa, Padang, Lampung dan Batak. Kesukuan yang beragam tetap menjadikan faktor utama yang menyediakan pola hidup masyarakat di kecamatan Bukit Kemuning dalam lingkungan kebersamaan, aman, damai, dan dapat menghilangkan perbedaan. Berikut penjelasan keadaan sosiologi Kecamatan Bukit Kemuning:

2. Bidang Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Bukit Kemuning mayoritas beragama Islam. Agama Islam menjadi nilai-nilai tersendiri dalam tata kehidupan

bermasyarakat, yang mana dengan agama akan terasa lebih mudah untuk mencapai suatu keinginan bersama. Sebab agama menjadi faktor pemersatu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Adapun jumlah penduduk kelurahan Bukit Kemuning yang beragama Islam sebanyak 18129 jiwa dan pemeluk agama lain yang ada di Kecamatan Bukit Kemuning di antaranya 64 jiwa, agama Hindu 2 jiwa, dan agama Budha berjumlah 23 jiwa.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jiwa
1	Islam	18.040
2	Kristen	64
3	Hindu	2
4	Budha	23
5	Aliran Kepercayaan lainnya	-
	Jumlah	18.129

Adapun dalam ibadah dibutuhkan yang namanya tempat/sarana ibadah agar terjalinnya suatu masyarakat yang dinamis. Sarana peribadatan bagi masyarakat setempat cukup memadai. Terdapat 19 buah dan mushalla 15 buah. Sedangkan bagi mereka yang beragama lain selain islam tidak memiliki tempat ibadah dan mereka melakukan peribadatannya di rumah mereka sendiri. Sarana tempat ibadah di Bukit Kemuning dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Sarana Peribadatan

No.	Sarana Kepribadatan	Jumlah
1	Masjid	19
2	Musholla	15
3	Gereja	-
4	Vihara	-

5	Pura	-
---	------	---

Sumber : Monografi 2010

Ada tempat/sarana ibadah untuk agama Kristen yang disebut dengan gereja itu terdapat satu tempat. Sebagai gantinya, ada satu rumah kosong yang dijadikan tempat berkumpulnya kelompok penganut agama Kristen. Kelompok penganut agama Kristen menganggap rumah itu gereja. Namun, di pemerintah daerah, tempat tersebut tidak diakui atau disebut ilegal.

Berbeda halnya dengan sarana agama Kristen, agama Islam memiliki tempat yang begitu memadai. Namun, uniknya tempat ibadah atau masjid yang berada di lingkungan masyarakat Bukit Kemuning tergolong berkelompok-kelompok. Dikatakan berkelompok, mengingat bahwa masyarakat Bukit Kemuning adalah masyarakat transmigran dari berbagai daerah seperti padang, jawa, palembangyang di dalamnya terdapat berbagai macam suku yang sudah dijelaskan pada poin keadaan Sosiologi.⁵²

Masjid merupakan tempat ibadah, tempat masyarakat berbagi dalam ilmu agama dan tempat perkumpulan pengajian-pengajian. Ini menunjukkan bahwa masjid merupakan salah satu tempat perkumpulan umat Islam. Bedanya di daerah bukit Kemuning ini, terlaksanannya kegiatan yang ada di masjid tergantung kepada lingkungan rumah yang berada di sekitarnya.

3. Bidang Pendidikan

Masyarakat di Kecamatan Bukit Kemuning pada umumnya berpendidikan sekolah dasar(SD),SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Namun

⁵² Wawancara pribadi dengan aparatur Desa pada hari Jum'at tanggal 12 November 2018.

ada juga masyarakat yang tidak mengenyam bangku pendidikan yakni, sebanyak 1832 jiwa. Ini menunjukkan bahwa terdapat bermacam ragam pendidikan di masyarakat Bukit Kemuning.

Tabel 6. Jumlah Jiwa Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jiwa
1	Tidak Sekolah	1.832
2	Taman Kanak-Kanak	2.930
3	SD/Sederajat	5.102
4	SMP/MTs	4.420
5	SMA/MA	3.531
6	D3	219
7	S1	95

Berdasarkan tabel di atas mayoritas masyarakat Bukit Kemuning mengenyam bangku pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bukit Kemuning sudah memiliki perhatian yang cukup baik terhadap pendidikan.

Dalam hal tingkat pendidikan, dan adanya kegiatan belajar mengajar ini disukseskan dengan adanya sarana pendidikan yang memadai dengan kualitas yang cukup baik. Adapun sarana pendidikan tersebut adalah:

Tabel 7. Jumlah Sarana Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD	10
2	Ibtidaiyah	3
3	SMP	2
4	MTs	2
5	SMA	1
6	MA	2
7	STAIN	1
Jumlah		17

Sumber: Data Monografi 2010

Berdasarkan tabel diatas, sarana pendidikan di daerah ini cukup memadai. Adapun untuk pendidikan keagamaan di wilayah Kecamatan Bukit Kemuning di samping madrasah-madrasah juga terdapat satu pondok pesantren dan majlis ta'lim sebanyak 6 buah. Selain itu, banyak dilaksanakan pengajian-pengajian setiap minggu.

4. Ekonomi Masyarakat

Di samping dikenal sebagai pusat penambangan timah, Bukit Kemuning juga dikenal sebagai penghasil lada. Bukit kemuning menjadi komoditas unggulan, sehingga Bukit Kemuning di kenal dengan sebutan daerah penghasil terbesar di lampung utara. Masyarakat Bukit Kemuning berlomba-lomba membuka usaha di bidang perkebunan lada. Keistimewaan perkebunan lada Bukit Kemuning adalah pada suasana alamnya yang teduh dan segar. Pengunjung dapat memasuki dan menikmati pemandangan hamparan tanaman lada mencium aromanya. Jika ingin mengetahui atau merasakan memetik biji lada, pengunjung bisa menemani dan membantu para pekerja yang sedang mengamil biji lada di perkebunan ini.

Penanaman kopi di desa Bukit Kemuning yang telah dilakukan pada akhir tahun 1998, telah mencapai 30 persen hasil. Hal ini sesuai dengan target. Walaupun tingkat kesulitan perawatan pohon kopi sangat tinggi, karena ditanam pada lahan sawah dengan kelembaban tanah tinggi, tiap baris pohon kopi dibuat drainase sedalam 30 cm dari permukaan tanah. Contohan intensifikasi kebun kopi Arabika dengan memanfaatkan lahan sawah ini masih berada di ketinggian di

atas 1100 m dpl. Dengan menggunakan jarak tanah 140 Cm luass kebun $\frac{1}{4}$ ha di targetkan hasil panen pada pembuahan perdana ini mencapai 500 kg kopi beras (green bean) kadar air 14%.

Hadirnya perkebunan kelapa sawit di Bukit Kemuning diakui telah memberikan efek ganda bagi masyarakat sekitarnya. Desa yang dulunya sepi, setelah hadirnya perkebunan kelapa sawit bisa tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ekonomi kecamatan-kecamatan itu juga mengalami pergerakan sangat positif.⁵³

5. Visi Dan Misi

1. Visi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka desa Karang Tani Lampung mempunyai visi yaitu :

“Mewujudkan Desa Yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat menuju masyarakat yang beriman dan bertaqwa”.

Dari visi diatas, maka ketercapaian visi Kepala Desa dapat diuraikan sebagai berikut:

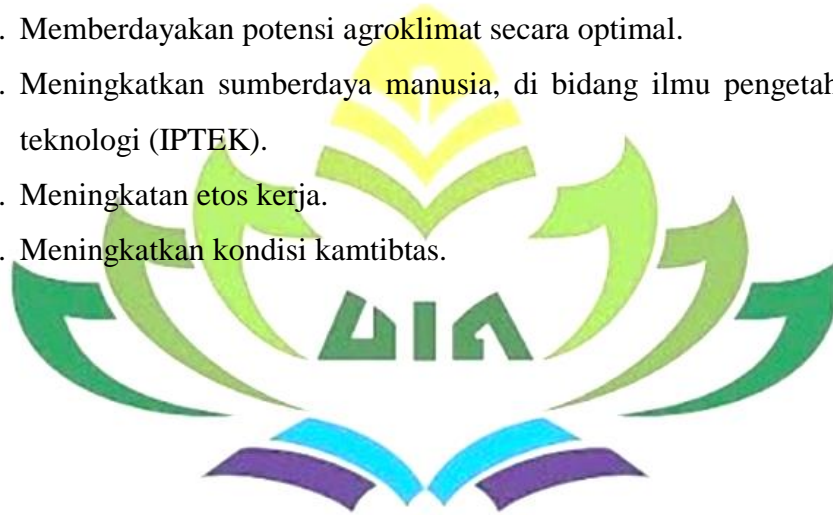
1. Makin kuatnya kelembagaan pemerintahan desa.
2. Makin meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan.
3. Makin baiknya kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam penyenggaraan pemerintahan desa.

⁵³[http:// bukit kemuning.blogspot.com](http://bukitkemuning.blogspot.com) diakses pada 19 Agustus 2018 Pukul10.30 WIB.

4. Makin baiknya makna pembangunan desa
5. Makin meningkatnya kehidupan agamis dari masyarakat
6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga memiliki daya saing yang tinggi

2. Misi

1. Menyelenggarakan pemerintah desa yang efisien, efektif dan bersih.
2. Megembangan perekonomian desa.
3. Menciptkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian.
4. Memberdayakan potensi agroklimat secara optimal.
5. Meningkatkan sumberdaya manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
6. Meningkatkan etos kerja.
7. Meningkatkan kondisi kamtibmas.



BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM PKH

A. Implementasi Program PKH di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara

Di Indonesia sejak 2004 telah diterbitkan undang-undang terkait perlindungan sosial, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam sistem jaminan sosial ini diakui bahwa setiap ini diakui bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terdiri dari jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sedangkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial lebih banyak mengatur perlunya keberadaan Tenaga Kerja Sosial.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengembangan perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk menaggulangi masalah kemiskinan demi terciptanya kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1) : “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materia,

spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.”⁵⁴

Program keluarga harapan ini memfokuskan tiga kategori/komponen yaitu:

- a. pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak KPM)
- b. kesehatan (meningkatkan kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita)
- c. kesejahteraan sosial (penyandang disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun).

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Menurut teori *human capital* kualitas sumber daya manusia rendah dari pendidikan dan kesehatan tidak menutup kemungkinan akan memicu kemiskinan. Oleh karena itu, hadirnya PKH ini mencoba untuk membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan.

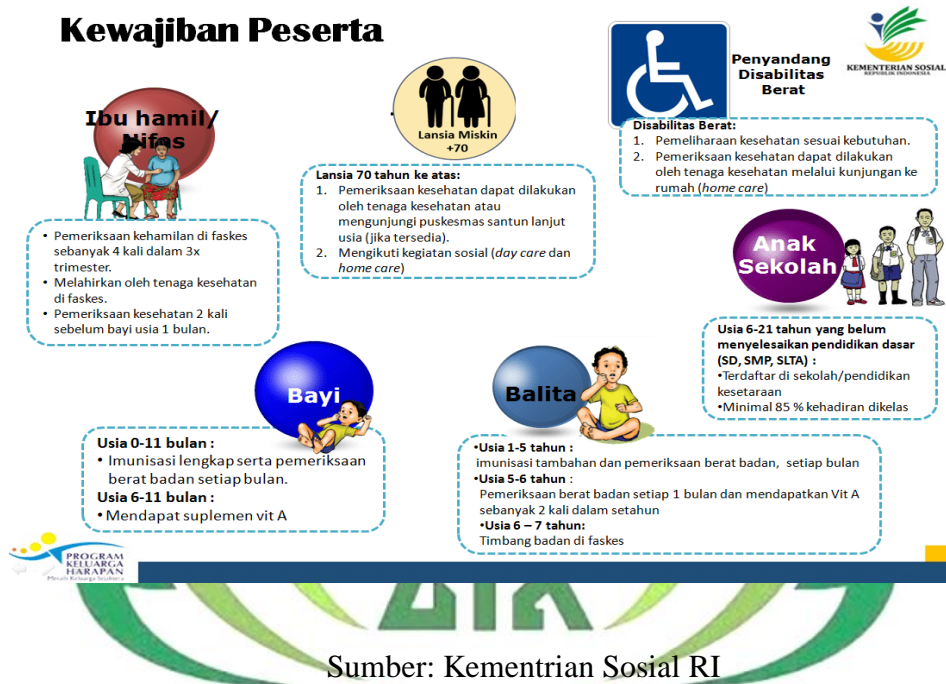
Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi, kegiatan kesehatan, maupun pendidikan dan kesejahteraan sosial, yang merupakan komponen penting dalam PKH, setiap program dan kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara umum oleh PPKH Pusat. Alur mekanisme PKH dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari pemilihan peserta kelompok, pertemuan kelompok, pembayaran verifikasi komitmen, pengguhan atau pembatalan peserta PKH, pemuktahiran data, dan pengaduan.

Tidak semua calon penerima bantuan PKH selalu lolos validasi. Peserta PKH kini disebut dengan KPM. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat dari berbagai program Bansos sehingga penerima PKH di sebut KPM PKH. Untuk

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Pasal 1 ayat 1

bisa menjadi peserta PKH, maka KPM calon Penerima Bantuan PKH harus memenuhi Kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Bagan 1. Kewajiban Peserta



Berdasarkan data yang diperoleh peneliti PKH merupakan upaya efektif yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesehatan keluarga ibu hamil, balita serta rumah tangga penerima manfaat serta mengurangi beban hidup dan meningkatkan pendidikan serta mensejahterakan hidup penyandang disabilitas dan juga lansia di Kecamatan Bukit Kemuning. Hal ini terbukti bahwa PKH, baik kesehatan pendidikan dan kesejahteraan sosial telah berjalan dengan cukup baik namun belum maksimal dalam artian masih banyak yang harus di koreksi dan tingkatkan baik itu dalam kinerja maupun sistem atau mekanisme dalam Implentasi Program Keluarga Harapan di kecamatan Bukit Kemuning, walaupun di awal-

awal masih terdapat proses adaptasi namun sekarang telah mengalami perkembangan yang cukup optimal.

Keberhasilan implementasi PKH patut di petahankan bahkan harus dikembangkan sehingga terdapat sinergisitas antara aspek pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial yang pada akhirnya PKH mampu mencapai tujuan serta indikator yang diharapkan oleh PKH.

Kelembagaan PKH :

- a. Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan PKH sebagai atasan yang membawahi Puskesmas dan Bidan Desa yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta PKH.
- b. Sosialisasi kepada peserta PKH diawal program oleh pendamping PKH.

Kepesertaan PKH :

- a. Data kepesertaan yang digunakan oleh PKH Kecamatan Bukit Kemuning berasal dari BPS Pusat.
- b. Pengajuan peserta baru tidak dapat dilakukan karena pendataan hanya dapat dilakukan oleh BPS.

Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan selama mereka menerima bantuan, mereka akan:

- a. Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar.
- b. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak.

- c. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil.

Tabel. 8
Syarat dan Sasaran PKH

Sasaran	Persyaratan (Kewajiban Peserta)
Ibu Hamil	Melakukan pemeriksaan kehamilan (antenatal care) sebanyak minimal 4 kali (K1 di trimester 1, K2 di trimester 2, K3 dan K4 di trimester 3) selama kehamilan
Ibu Melahirkan	Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
Ibu Nifas	Ibu yang telah melahirkan harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatannya setidaknya 2 kali sebelum bayi mencapai usia 28 hari
Bayi Usia 0-11 bulan	Anak berusia dibawah 1 tahun harus diimunisasi lengkap dan ditimbang secara rutin setiap bulan
Bayi Usia 6-11 bulan	Mendapat suplemen tablet vitamin A
Anak usia 1-5 tahun	Dimonitor tumbuh kembang dengan melakukan penimbangan secara rutin setiap 1 bulan Mendapat vitamin A sebanyak 2 kali setahun pada bulan Februari dan Agustus.
Anak Usia 5-6 tahun	Melakukan penimbangan secara rutin setiap 3 bulan sekali dan mengikuti program pendidikan usia dini.

Fasilitas kesehatan yang disediakan adalah :

- Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, Pusling, Posyandu.
- Dokter, Bidan, Petugas Gizi, Jurim, dan perawat.

- Tablet Fe, Vitamin A, Obat-obatan dan bahan-bahan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir.
- Vaksin BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B, TT ibu Hamil
- Buku Register (Kartu Menuju Sehat)

Anak KPM (keluarga penerima manfaat) pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan di sekolah formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% tatap muka. Besaran bantuan untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerima bantuan, baik kategori kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

Calon peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi KPM (keluarga penerima manfaat) dan menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jika terus menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.⁵⁵

Program keluarga harapan bidang kesehatan mensyaratkan KPM (yaitu ibu hamil, ibu nifas, dan anak usia < 6 tahun) melakukan kunjungan rutin ke berbagai sarana kesehatan. Oleh karena itu, program ini secara langsung akan mendukung

⁵⁵ Dokumen Pada Arsip Di Kantor Sekretariat PKH Kabupaten Lampung Utara

pencapaian target program kesehatan. Di samping itu, PKH juga merupakan bagian yang tidak terlepas dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM). Setiap anggota keluarga menerima manfaat (KPM) dapat mengunjungi dan memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan.

Puskesmas diharapkan mampu memberikan seluruh paket layanan kesehatan yang menjadi persyaratan bagi peserta PKH Kesehatan termasuk memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (khususnya puskesmas PONED). Puskesmas pembantu dan Puskesmas Keliling, yang merupakan satelit Puskesmas (dan jika dilengkapi dengan tenaga bidan), sangat diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir. Pondok bersalin desa (Polindes) biasanya dilengkapi dengan tenaga bidan desa. Polindes diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir. Polindes biasanya dilengkapi dengan bidan desa. Polindes diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu selama kehamilan, pertolongan persalinan, dan bagi bayi baru lahir maupun pertolongan pertama pada kasus-kasus gawat darurat.

Posyandu yang dikelola oleh para kader kesehatan dengan bantuan dan supervisi dari puskesmas, Pustu, serta penyuluhan kesehatan. Di samping memberikan pelayanan kesehatan di polindes, bidan desa yang melakukan praktek di rumah dapat dimanfaatkan oleh peserta PKH khususnya dalam pemeriksaan ibu hamil, memberikan pertolongan persalinan, maupun memberikan pertolongan pertama pada kasus-kasus ke gawat daruratan. Program

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program JPKMM, maka kegiatan PKH kesehatan sepenuhnya di biyai dari sumber program JPKMM/ Askeskin di Puskesmas.

Pada awal pelaksanaan, puskesmas dan posyandu memiliki peran penting dalam menetapkan jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta PKH ke berbagai fasilitas kesehatan. Prosedur penetapan jadwal kunjungan PKH ke berbagai fasilitas kesehatan dari PPKH Kecamatan (Pendamping). Petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan baik secara aktif maupun pasif kepada semua peserta PKH. Secara aktif, misalnya mengunjungi peserta PKH yang tidak hadir sesuai jadwal yang sudah ditetapkan untuk diberikan pelayanan kesehatan harus menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan (seperti Vitamin A, Vaksin, tenaga Kesehatan, dll).

Pembayaran bantuan kategori kesehatan pada tahap selanjutnya diberikan atas dasar verifikasi yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Jika peserta PKH memenuhi komitmennya (yaitu mengunjungi fasilitas kesehatan yang sudah ditetapkan sesuai jadwal kunjungan di atas), maka KPM akan menerima bantuan non tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bantuan non tunai yang diberikan kepada KPM peserta PKH, bukan untuk membiayai/membayar jasa layanan kesehatan atau pendidikan. Jenis lembaga pendidikan dasar yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak penerima bantuan PKH terdiri dari Lembaga Pendidikan Formal :

- a) Sekolah Dasar (SD)

- b) Madrasah Ibtidayah (MI)
- c) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- d) Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- e) Pesantren Salafiyah

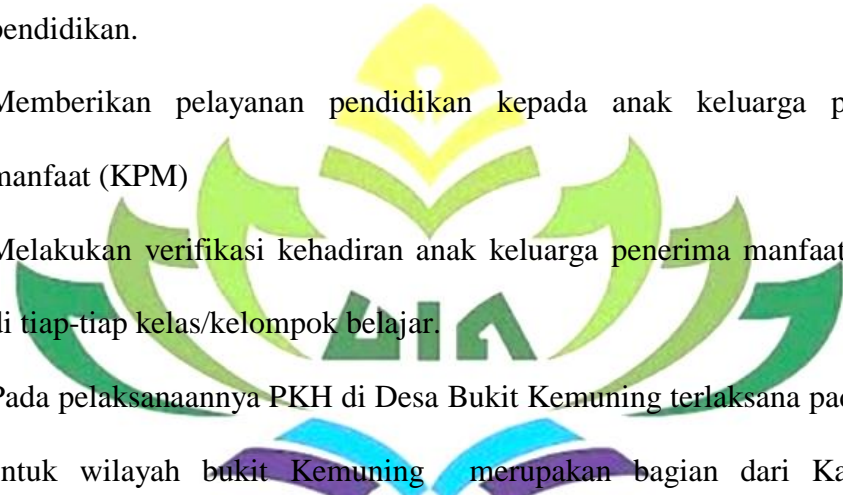
Lembaga Pendidikan non Formal :

- a) BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar)
- b) SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)
- c) PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Lembaga pendidikan tersebut di atas memiliki peranan penting untuk mensukseskan pencapaian tujuan PKH pendidikan. Setiap satuan pendidikan diharuskan menerima anak peserta PKH yang mendaftar sesuai ketentuan yang berlaku, dan dibebaskan dari segala bentuk biaya pendidikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, institusi pendidikan berkewajiban memberikan pendidikan kepada seluruh peserta didik yang terdaftar. Penyelenggar satuan pendidikan harus memberikan pengajaran kepada peserta didik, termasuk anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH pendidikan. Pengajar harus mengacu kepada kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan. Bantuan non tunai PKH kategori pendidikan akan terus diberikan untuk peserta PKH jika anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH memenuhi komitmennya, yaitu menghadiri dan mengikuti proses pembelajaran minimal 85% hari efektif sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung. Tingkat kehadiran peserta

didik harus diverifikasi oleh para tenaga pendidik di lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.

Pimpinan satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PKH di setiap lembaga pendidikan. Pimpinan satuan pendidikan juga harus menjamin agar ketiga peran tersebut di atas dapat dijalankan dengan optimal. Ringkasan peran lembaga pendidikan:

- 
- a) Menerima pendaftaran anak keluarga penerima bantuan PKH di satuan pendidikan.
 - b) Memberikan pelayanan pendidikan kepada anak keluarga penerima manfaat (KPM)
 - c) Melakukan verifikasi kehadiran anak keluarga penerima manfaat (KPM) di tiap-tiap kelas/kelompok belajar.

Pada pelaksanaannya PKH di Desa Bukit Kemuning terlaksana pada tahun 2012 untuk wilayah bukit Kemuning merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara. Pada setiap kelurahan memiliki satu pendamping PKH untuk terlaksananya PKH dengan baik. berikut ini merupakan mekanisme program keluarga harapan dari proses awal hingga akhir.

1. Mekanisme Program PKH di Kecamatan Bukit Kemuning

a. Seleksi dan Penetapan Lokasi PKH

Proses awal dari pelaksanaan program keluarga harapan salah satunya yaitu seleksi dan penetapan lokasi, untuk program keluarga harapan mekanisme dan prosedur ini dilakukan sebelum program berjalan di tingkat tataran teknis.

Dalam hal ini pihak Kementrian dan Pemda walikota mengambil perannya, khususnya walikota Lampung Utara saling berkoordinasi dengan pihak Kementrian. Tentunya seperti apa yang diungkapkan pada saat wawancara berikut:

*“Program ini adalah program unggulan program yang mendunia kebijakan dari pihak pusat yaitu pihak kementrian sosial dan pihak pemda setempat, kalo untuk seleksi dan penetapan lokasi itu langsung dari kemensos yang menangani dan berkerjasama dengan BPS, kecamatan, serta kelurahan yang merujuk dari data sensus. dalam hal ini tentunya pak walikota setempat yang memang setuju program pkh ini dilaksanakan didaerah tersebut. Dan melihat kondisi masyarakat ataupun daerah tersebut masih banyak yang berhak menerima bantuan PKH”.*⁵⁶

b. Pertemuan Awal dan Validasi Calon Peserta PKH

Setelah proses awal yaitu penetapan lokasi selesai, selanjutnya yaitu proses mulainlah di adakan nya pertemuan awal proses ini merupakan kegiatan PKH ditingkat KPM (keluarga Penerima Manfaat) dimana pendamping kecamatan bertemu dengan KPM untuk pertama kalinya sekaligus Validasi data calon kepersertaan. Ketentuan SUPA (Surat Undangan Pertemuan Awal) :

- Pendamping mengisi nama dan alamat calon peserta PKH yang diambil dari formulir validasi atau dari softcopy melalui WEB e-PKH dari operator PKH.

⁵⁶ Wawancara Pribadi dengan bang Alexander S.sos Koodinator PPKH Kabupaten Lampung Utara

- Pendamping mengisi waktu dan tempat pertemuan awal dalam SUPA yang bersumber dari hasil koordinasi dengan aparat setempat.
- Pendamping mencocokkan data dan informasi yang ada salam data awal BNBA yang dikirim dari pusat dengan informasi faktual/dokumen kekinian calon peserta PKH
- Pendamping wajib mengantarkan SUPA ke alamat calon peserta PKH, secara langsung (tidak boleh dititipkan)
- Pada saat mengantarkan SUPA, ditegaskan kembali kepada calon peserta agar membawa dokumen persyaratan pada saat pertemuan awal.⁵⁷

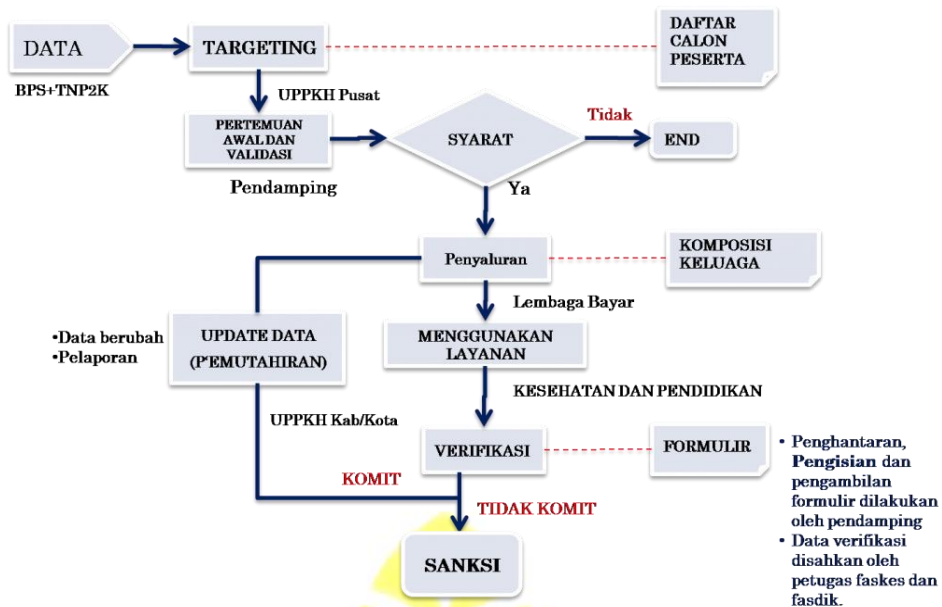
Pertemuan ini di selenggarakan oleh PPKH Kabupaten/kota termasuk dalam menentukan lokasi dan kapan masing-masing KPM harus menghadiri pertemuan selanjutnya Berikut wawancara pribadi saya dengan pendamping PKH di Bukit Kemuning:

*“ kegiatan pertemuan awal kita dengan calon peserta PKH itu kita sudah dapat data nya dari BPS terus setelah itu kita langsung turun kelokasi yang sebelumnya di bagi-bagi kelurahan, seriap para pendamping untuk mengumpulkan warga-warga dampingannya dengan berkoordinasi pada pihak kecamatan kelurahan RW dan RT untuk validasi kita keluarga yang manakah layak mendapat bantuan dari komponen pendidikan atau kesehatan ”.*⁵⁸

Bagan 2. Mekanisme seleksi data calon KPM

⁵⁷ <https://pkhpatampanua.wordpress.com/2017/11/14/pertemuan-awal-dan-validasi-data-calon-peserta-pkh-tahun-2017/> diakses 31 des 2018

⁵⁸ Wawancara pribadi dengan bang Suhada selaku pendamping PKH Bukit Kemuning



Sumber : Kementrian Sosial RI

c. Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyalur bantuan sosial, adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Sosial melalui Bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial, pada proses ini bantuan non tunai hanya diberikan kepada KPM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti syarat program (pendidikan dan kesehatan). Bukti tanda kepesertaannya adalah kepemilikan kartu PKH yang di sebut (KKS) kartu keluarga sejahtera yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kartu PKH di berikan kepada setiap peserta oleh pendamping sebelum pembayaran pertama dilakukan. Pada tahap penyaluran dana dibutuhkan ketepatan waktu dan ketepatan jumlah. Berdasarkan hasil kuesioner pada 70 responden 100% peserta PKH menjawab “iya” untuk ketepatan waktu dan ketepatan jumlah

pada tahap penyaluran dana. Tahap penyalurannya pun dilakukan sesuai dengan pedoman umum. Tidak terdapat pemotongan dana oleh pihak-pihak tertentu sehingga proses penyaluran PKH di Desa Bukit Kemuning sudah dilakukan dengan efektif. Adapun besaran nominal yang dikeluarkan dari program keluarga harapan kepada KPM yaitu :

Tabel 9. Dana Bantuan PKH

NO	KOMPONEN BANTUAN	INDEKS BANTUAN (Rp)
1	<u>Bantuan tetap</u>	500.000,-
2	<u>Bantuan ibu hamil/menyusui</u>	1.200.000,-
3	<u>Bantuan anak usia di bawah 6 (enam) tahun</u>	1.200.000,-
4	<u>Bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau sederajat</u>	450.000,-
5	<u>Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat</u>	750.000,-
6	<u>Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat</u>	1.000.000,-
7	<u>Bantuan penyandang disabilitas berat</u>	3.100.000,-
8	<u>Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas</u>	1.900.000,-

Sumber: SK Menteri Sosial RI

Pencairan dana bantuan dilakukan oleh Bank penyalur yang bekerjasama dengan kementrian sosial. Untuk di lampung utara bank penyalurnya adalah bank Mandiri KPM di beri wewenang untuk menngambil sendiri melalui KKS sekaligus ATM pada setiap tiga bulan sekali. Seperti yang dikutip dalam wawancara, berikut ini:

“Sebelum waktu pencairan para pendamping melakukan pertemuan kelompok terlebih dahulu memproses ulang kembali betul atau tidaknyanya mereka adalah penerima program keluarga harapan tersebut yang sebelumnya pernah dilakukan

*validasi. Proses dari validasi ke pencairan pertama PKH itu kurang lebih tiga bulan setelah validasi”.*⁵⁹

d. Pembentukan Kelompok Peserta PKH

Tahap selanjutnya setelah KPM mendapat pembayaran pertama PPKH (Pelaksana Program Keluarga Harapan) memfasilitasi pertemuan kelompok peserta PKH. Tujuan di bentuknya ketua kelompok, yaitu berfungsi sebagai *contact person* bagi PPKH Kabupaten/kota dan Kecamatan untuk kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan sebagainya juga untuk mempermudah pendamping untuk mengumpulkan para anggota masing-masing PKH.

Ketua kelompok juga di pilih secara musyawarah terbuka menjangir kadidat yang nantinya akan berkoordinasi dengan PPKH agar lebih mudah pada saat proses kegiatan-kegiatan PKH kedepannya. Seperti pada wawancara berikut:

*“Kalo pembentukan ketua kelompok mereka musyawarah terlebih dahulu, siapa-siapa yang aja yang mau jadi ketua nanti kita kasih pengarahan dan calon ketua mampu mengkoordinir dan diusahakan ketua punya motor dan hp itu yang penting jadi ditunjuk calon-calon ketua seperti pemilihan seperti biasa”.*⁶⁰

e. Verifikasi Komitmen data Peserta PKH

Pada proses verifikasi ini prinsipnya, yaitu penerima bantuan yang sudah melakukan validasi harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di program PKH ini. Verifikasi atas pemenuhan syarat peserta PKH ini dilakukan terhadap

⁵⁹ Wawancara pribadi dengan bang dedi sulaiman sebagai koordinator kecamatan di bukit kemuning

⁶⁰ Wawancara pribadi dengan ibu risnani selaku pendamping PKH di bukit kemuning 18/11/2018

pendaftaran dan kehadiran baik disekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas untuk komponen kesehatan. Seperti wawancara berikut ini:

“Verifikasi komitmen peserta maksud nya adalah ketika calon sudah dinyatakan sah sebagai peserta PKH mereka harus menjalani komitmen yang telah ditentukan misalnya ketika ada pengecekan ulang ke kesekolah atau ke puskesmas mereka harus rutin menjalankan komitmen tersebut seperti halnya anak para KPM harus rajin kesekolah dilihat oleh data absensi siswa dan ibu hamil harus rajin melakukan posyandu jika mereka tidak melakukan itu maka bisa saja antuannya di pending. Apabila kejadian ini terulang selama tiga bulan maka bantuan Program PKH akan dicabut dan bisa jadi dia tidak akan mendapat bantuan lagi itu sanksi yang di berikan kepada peserta yang tidak komitmen”.⁶¹

f. Pemutakhiran Data

Proses pemutakhiran data ini adalah perubahan apabila ada salah atau KPM yang tidak sesuai dengan data awal yang tercatat pada *Master Database*.

Diantaranya, yaitu:

1. Perbaikan nama atau berkas- berkas penting lainnya
2. Menikah, bercerai, meninggal, pindah/bekerja di luar domisili, TKI/TKW
3. Ibu hamil
4. Kelahiran anggota keluarga
5. Masuknya anak-anak baru kesekolah
6. Pindah tempat tinggal/ Pindah sekolah
7. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses
8. Dan hal-hal yang akan ditemukan kemudian hari.⁶²

Pemutakhiran data dilaporkan oleh peserta di PPKH kecamatan. Pendamping PKH bekerjasama dengan ketua kelompok akan memverifikasi perubahan data terkait. Seperti yang disampaikan pada wawancara berikut:

⁶¹ Wawancara pribadi dengan bang alexander sebagai koordinator ppkh kabupaten lampung utara 16/11/2018

⁶² Kementrian sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial, 2013) h. 58

*“ pemutakhiran adalah data yang sudah ada di cocokan dengan kondisi KPM pada saat itu misalnya KPM saya bilang kalau dirinya sedang hamil kita perlu bukti dari bidan jika benar dia sedang hamil maka dia perlu mengumpulkan fotocopy berkas tanda bukti kehamilan dari bidan kemudian data tersebut diajukan ke operator untuk di mutakhirkan baru seelah itu ada pengubahan atau penambahan dari KPM tersebut. Pemutakhiran ini biasanya dilakukan sebelum pencairan dilaksanakan disitu pendamping meencoba mengupdate data terbaru”.*⁶³

2. Proses Awal Hingga Akhir Program PKH di Kecamatan Bukit Kemuning

a. Sosialisasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bukit Kemuning

Menurut pedoman Umum PKH Tahun 2013 bahwa sosialisasi dan komunikasi PKH dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran, informasi dan pembelajaran pada berbagai pelaksanaan di pusat dan daerah, kalangan media LSM, akademisi dan masyarakat, termasuk peserta PKH, terutama di daerah PKH. Tersosialisasikanya PKH kepada semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, merupakan kunci kesuksesan PKH. Untuk itu disusun strategi komunikasi dan sosialisasi ini tidak hanya memfokuskan pada aspek implementasi dan keberhasilan pelaksana program PKH tersebut, tetapi yang menjadi aspek pengembangan kebijakan, Khususnya dalam membangun dukungan dan komitmen untuk melembagakan PKH kedalam bentuk Jaminan sosial.

b. Proses Pendataan Penerima PKH di Kecamatan Bukit Kemuning

Targeting PKH didasarkan atas data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial dari TNP2K yang tersumber dari pendataan Program Perlindungan Sosial

⁶³ Wawancara pribadi dengan bang alexander selaku Koordinator PPKH Kabupaten Lampung Utara 16/11/2018

(PPLS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proses penetapan sasaran menghasilkan data calon peserta PKH sesuai dengan persyaratan PKH dan jumlah calon peserta PKH per daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa). Penetapan lokasi dan pemilihan calon peserta PKH. Penetapan Kabupaten/Kota dan Kecamatan terutama didasarkan atas komitmen pemerintah daerah dalam bentuk:

1. Pengajuan proposal dari Pemda Kabupaten/Kota ke PPKH Pusat dengan melampirkan surat rekomendasi Provinsi.
2. Ketersediaan fasilitas pendidikan (fasdik) dan fasilitas kesehatan (faskes) yang sudah cukup memadai untuk mendukung program PKH tersebut.
3. Penyediaan fasilitas sekretariat PPKH di Kabupaten/Kota
4. Penyediaan fasilitas sekretariat untuk pendamping PKH di Kecamatan Bukit Kemuning.

Faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan PPKH pusat berdasarkan *database* yang telah di sediakan oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), maka PPKH Pusat melakukan pemilihan KPM yang bisa menjadi peserta PKH sesuai dengan kriteria. KPM (keluarga Penerima Manfaat) yang di pilih sebagai calon peserta PKH adalah KPM yang mempunyai salah satu atau lebih kriteria berikut:

- a) Ibu hamil/nifas
- b) Anak berusia di bawah 6 tahun
- c) Anak SD

- d) Anak SMP
- e) Anak berusia 15-28 namun belum menyelesaikan pendidikan dasar
- f) Lansia diutamakan berusia 70 tahun
- g) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Hasil proses seleksi ini adalah nama KPM calon peserta PKH yang dilengkapi dengan alamatnya. Daftar nama di sini adalah perempuan dewasa (ibu, bibik, nenek) yang mengurus KPM yang akan menerima bantuan PKH tersebut dan nama anggota KPM yang akan mendapat bantuan PKH. Berdasarkan data calon peserta PKH ini, UPPKH pusat meninformasikan daerah yang menjadi target pelaksanaan PKH dan jumlah calon peserta PKH di masing-masing daerah ke Dinas/Instansi sosial Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penempatan dilakukan melalui /Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, Informasi itu, selain melalui surat resmi dapat dilakukan melalui fax atau email. Dalam pelaksanaan PKH, Kementerian Sosial telah melakukan sinergitas dengan program lain seperti Jamkesmas dan Jampersal dari Kementerian Kesehatan, serta Beasiswa pendidikan bagi keluarga miskin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selain itu pelaksanaan PKH telah bersinergi dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Askesos, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), BSM, beras sejahtera (rastra) dan Program Pengurangan Pekerja Anak yang dilaksanakan Kemenakertrans.

Tabel.10
DATA PESERTA PENERIMA PKH
KECAMATAN BUKIT KEMUNING 2018-2019

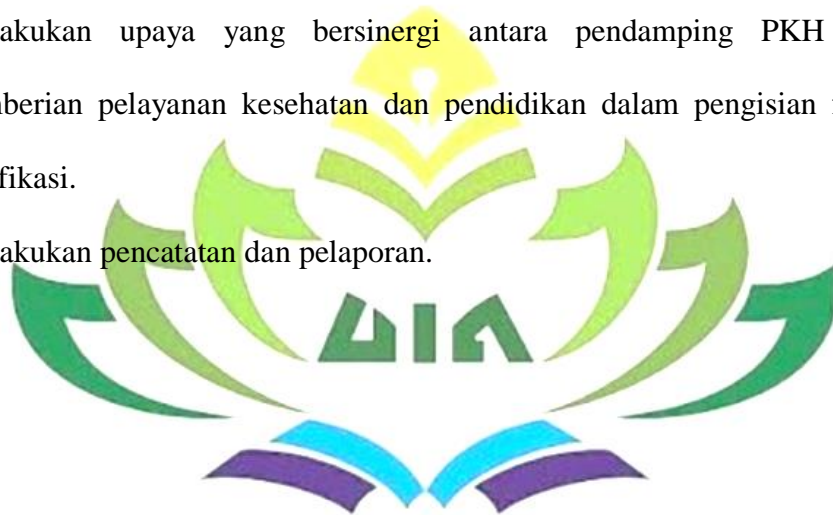
No.	Nama Desa	Jumlah Peserta
1	Bukit Kemuning	812
2	Dwikora	222
3	Muara Aman	398
4	Sidomulyo	111
5	Suka Menanti	441
6	Tanjung Baru	203
7	Tanjung Baru Timur	146
8	Tanjang Waras	187
	TOTAL	2.520

c. Proses Pendamping Pgram Keluarga Harapan di Kecamatan Bukit Kemuning

Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendamping di tingkat Kecamatan. Tugas dan tanggungjawab Pendamping PKH atau PPKH Kecamatan secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada KPM (keluarga penerima manfaat) peserta PKH. Wilayah kerjanya meliputi seluruh desa/kelurahan dan lebih rinci dijelaskan dalam Pedoman Operasional Kelembagaan PKH. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, PPKH Kecamatan bertanggungjawab kepada PPKH Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Camat setempat. Bila dalam satu wilayah ditunjuk salah seorang dari dua Pendamping, maka wajib ditunjuk salah seorang dari pendamping untuk menjadi Koordinator Pendamping tingkat Kecamatan. Adapun tugas utama pendamping PKH adalah sebagai berikut:

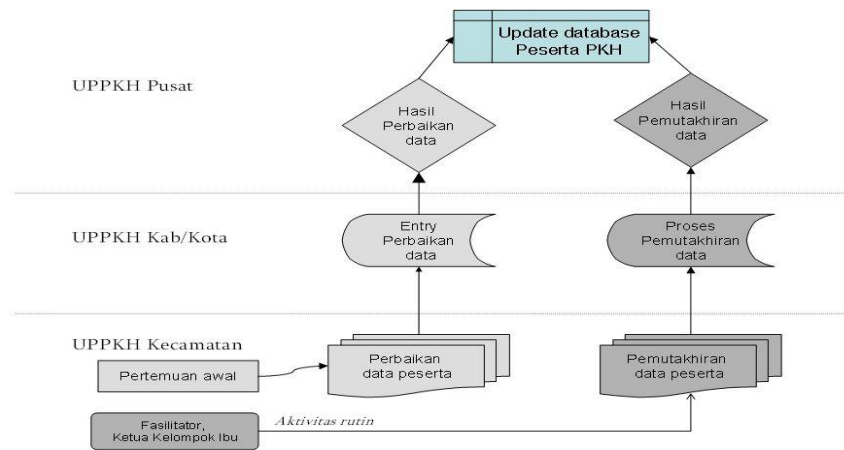
- Melakukan pemutakhiran data.
- Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan.
- Mengunjungi rumah peserta PKH.

- Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan
- Membuat jadwal pertemuan atau kunjungan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH
- Membuat jadwal pertemuan atau kunjungan bulanan dengan petugas kesehatan dan pendidikan di lokasi pelayanan
- Memberi motivasi kepada peserta PKH dalam menjalankan komitmen.
- Melakukan upaya yang bersinergi antara pendamping PKH dengan pemberian pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam pengisian formulir verifikasi.
- Melakukan pencatatan dan pelaporan.



Bagan 3. proses pemutakhiran data

ALUR PEMUTAKHIRAN DATA



Sumber. Kementerian Sosial RI

d. Proses Distribusi Dana PKH Kepada KPM di Kecamatan Bukit Kemuning

PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat atau disebut *Conditional Cash Transfers (CCT)*. Bantuan PKH diberikan kepada KPM (keluarga penerima manfaat) yang telah menjadi peserta PKH. Sesuai Pedoman Umum PKH, bahwa penyaluran bantuan PKH dilaksanakan empat kali penyaluran dalam satu tahun. Khusus pembayaran bantuan bagi peserta PKH dilokasi baru dilakukan setelah ada surat penetapan dari pejabat Berwenang jadwal pembayaran dan pelaksanaan bantuan disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada pada tahun berjalan sesuai kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan. Sedangkan untuk pembayaran bantuan tahap berikutnya, dapat tetap dilaksanakan walaupun proses verifikasi belum dilaksanakan secara optimal.

Dalam aturan pedoman umum PKH, mekanisme pelaksanaan penyaluran dana bantuan kepada KPM peserta PKH dilaksanakan melalui lembaga bayar, berdasarkan hasil pelelangan pekerjaan pencetakan formukir, pendistribusian formulir dan pelaksanaan proses penyaluran dana bantuan PKH, pelaksanaan pembayaran untuk pengembangan Kabupaten/Kota dilaksanakan maksimal tiga tahap pembayaran disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pertemuan awal dan valiasi.

I. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Politik Islam

Perlindungan Sosial merupakan hak asasi manusia, berlaku universal untuk terhadap ketidakmampuan penduduk miskin menghadapi risiko sosial. Jaminan Kesejahteraan Sosial telah menjadi komitmen nasional yang diamanatkan secara konstitual dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam paradigma Islam pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber-sumber dana yang sah yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan sosial. Islam menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang di tanggulasi, diantara cara yang ditetapkan oleh islam dalam menaggulangi kemiskinan adalah himbauan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Bahkan menetapkan hak-hak bagi fakir miskin dalam harta orang kaya seperti zakat, shadaqah sunnah, dan

lain-lain yang termasuk dalam kategori pembantuan jaminan sosial. Tanggung jawab pemerintah Indonesia pada rakyatnya tercermin pada di berlakukannya perlindungan sosial tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini.

Program terbaru perlindungan sosial dalam pengentasan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai diberlakukan sejak tahun 2007. PKH yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi para peserta penerima bantuan secara tunai namun dengan syarat tertentu sesuai dengan ketentuan pedoman umum PKH. Dalam Islam mengentaskan kemiskinan dan agar terwujudnya kesejahteraan, program perlindungan sosial haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kezoliman dan arogansi. Dalam implementasinya PKH dalam mengentaskan kemiskinan dilihat dari sudut pandang nilai dasar Ekonomi Islam sebagai berikut :

1. Keadilan

Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini PKH di Bukit Kemuning belum menjunjung Tinggi budaya nepotisme.

Keadilan adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran keberanian dan konsisten pada kebenaran. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

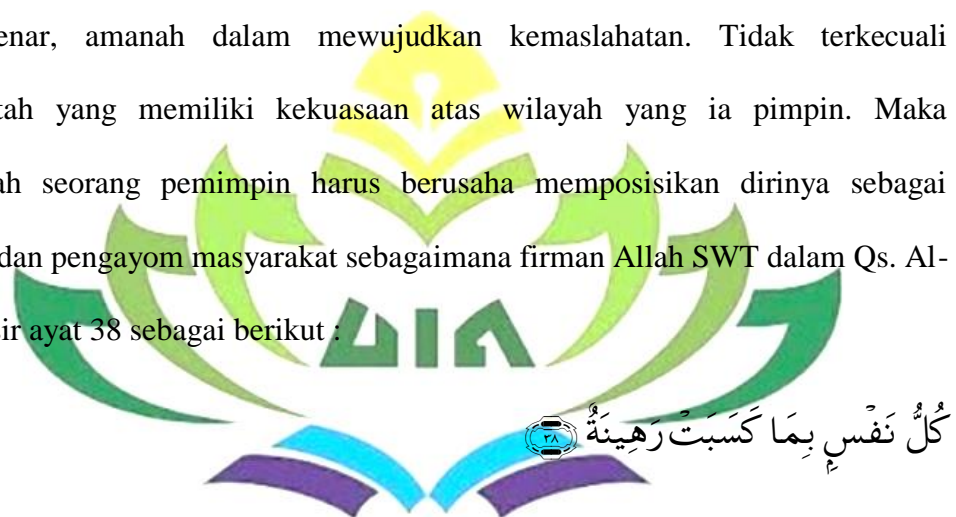
Dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nahl ayat 90 menjelaskan bahwa Allah SWT menyebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Sufyan Ibnu Uyaynah, mengatakan bahwa istilah adil dalam ayat ini ialah sikap pertengahan antara lahir dan bagi setiap orang yang mengamalkan suatu amal karena Allah SWT.

Pada surat An-Nahl ayat 90 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat menekankan kita selaku umat manusia berperilaku adil, termasuk adil dalam perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Keadilan dalam perlindungan sosial ini bertujuan agar distribusi kekayaan dapat merata sehingga tidak ada jurang pemisah antara kaya dan miskin. PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang merupakan bentuk tanggung jawab serta kepedulian pemerintah dimana dalam implementasinya PKH di Bukit Kemuning termasuk kurang tepat sasaran. Dalam menentukan peserta penerima-bantuan, sehingga yang mendapat bantuan PKH bukan sepenuhnya kaum miskin orang yang mampu/kaya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan belum sepenuhnya diterapkan pada Program PKH,

terutama di Bukit Kemuning. Jadi implementasi PKH di Bukit Kemuning dalam perspektif politik islam dalam mengentaskan kemiskinan kurang efektif karna belum memenuhi nilai keadilan.

2. Tanggung Jawab

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku politik yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Tidak terkecuali pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang ia pimpin. Maka hendaklah seorang pemimpin harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Muddatsir ayat 38 sebagai berikut :



Artinya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Dalam tafsir Katsir Qs. Al-Muddatsir ayat 38 menjelaskan bahwa: Allah SWT memberitahu bahwa: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas yang telah diperbuatnya”. Yakni bergantung kepada amal perbuatannya sendiri kelak dihari kiamat, demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya.

Pada ayat ini berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa setiap diri memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan negara yang dipimpinnya. Seorang pemimpin haruslah mampu bersifat amanah demi

tercapaianya kesejahteraan karena setiap apa yang diamanahkan demi tercapainya kesejahteraan karena setiap apa yang diamanahkan kepada seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Dari segi pelaksanaan Program Keluarga Harapan, sebagaimana hasil penelitian menunjukan bahwa PKH berjalan dengan sangat baik. Sehingga dengan pengimplementasian program tersebut dengan baik dan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka di harapkan hal tersebut dapat menjadi jalan bagi bangsa indonesia untuk mencapai tujuannya menaggunglagi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia. Meskipun hal tersebut memerlukan waktu yang panjang, namun dengan pencapaian tujuan jangka PKH yaitu memutuskan mata rantai kemiskinan. Antar generasi-generasi dari keluarga miskin kelak dapat keluar dari kemiskinan. Ini dapat terwujud jika anak-anak dari keluarga miskin mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, PKH mengutamakan pemenuhan pendidikan dan pelayanan kesehatan pada anak-anak dari keluarga miskin agar kelak mereka tidak jauh dari kondisi yang sama dengan orang tua mereka.

Adapun pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang telah dijalankan dengan sangat baik dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksana Tugas Pendamping

Program Keluarga Harapan adalah suatu kebijakan pemerintah dalam usaha menanggulangi kemiskinan yang ada di indonesia. Suatu kebijakan mengandung unsur formulasi/pembentuk kebijakan, implementasi/pelaksanaan

serta evaluasi kebijakan. Dalam hal pelaksanaan kebijakan yang paling berperan adalah pelaksanaan kebijakan itu sendiri serta proses dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Tercapainya pelaksanaan Program Keluarga Harapan dengan sangat baik di kecamatan bukit kemuning tidak terlepas dari peran aktif pendamping yang senantiasa melakukan tugasnya dalam pendampingan.

Seluruh pendamping PKH memiliki tugas yang sangat penting sebagai pelaksana PKH yang paling dekat dengan masyarakat. Setiap bulan para pendamping harus melakukan pertemuan rutin dengan KPM peserta PKH. Pertemuan ini dilakukan untuk berbincang-bincang dengan peserta mengenai perkembangan masyarakat setelah menerima bantuan, untuk mengontrol mereka agar bantuan benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya. Selain itu dalam setiap pertemuan pendamping akan senantiasa mendengar keluhan KPM seputar bantuan PKH ataupun masalah pendidikan dan kesehatan jika mereka memiliki kendala yang kemudian keluhan itu akan dikemukakan dalam rapat di PPKH Kabupaten untuk dapat ditindaklanjuti dan diberikan solusi. Hal-hal tersebut ternyata juga dilaksanakan dengan baik oleh para pendamping PKH di Kecamatan Bukit Kemuning. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan para ketua kelompok peserta PKH dari masing-masing desa pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mereka mengatakan bahwa:

“pendamping kami benar-benar memperhatikan kami, mereka tidak segan berbaur dengan rakyat kecil seperti kami, mereka melakukan tugasnya dengan

*baik sehingga kami para peserta program dapat menerima bantuan kami sesuai ketentuan. Jika terjadi kesalahan, maka mereka akan mencari jalan keluarnya agar kami tetap bisa menerima bantuan. Mereka selalu mengingatkan kami akan pentingnya kesehatan dan pendidikan.*⁶⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para pendamping PKH Kecamatan Bukit Kemuning melaksanakan perannya sebagai pendamping dengan sangat baik.

2. Proses pendataan

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan proses pendataan yaitu verifikasi dan pemutakhiran data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam program ini, karena dengan melakukan verifikasi dan pemutakhiran data maka akan diketahui apakah setiap KPM menjalankan kewajiban atau tidak. Serta mengetahui apakah anggota keluarga KPM memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh bantuannya.

Dan hasilnya penelitian menunjukan bahwa kegiatan verifikasi dan pemutakhiran data telah dilakukan dengan baik. Verifikasi data berupa pengisian formulir Fasdik (fasilitas pendidikan) dan Faskes (fasilitas kesehatan). Formulir Fasdik berisi absen setiap anak KPM penerima PKH yang dibawa oleh pendamping untuk di isi oleh petugas PUSTU atau POSYANDU yang ada di setiap desa. Formulir tersebut yang akan membuktikan apakah KPM yang memiliki balita dan ibu hamil rajin memeriksakan diri atau tidak.

⁶⁴ Ibu rika ketua kelompok KPM Desa Bukit Kemuning kecamatan bukit kemuning, wawancara tanggal 19 nov 2018

Dari hasil verifikasi tersebut maka akan diketahui apakah KPM memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan atau tidak. Selain itu, ada kegiatan pemutakhiran data yang menurut hasil penelitian juga menunjukkan hasil yang sangat baik dalam pelaksanaannya. Pemutakhiran data dilakukan 3 bulan sekali sebelum ditentukan dan dibayarkan. Pemutakhiran data yang dimaksud adalah data KPM yang telah ada diperbaharui dengan cara mengumpulkan para pengurus KPM penerima PKH dan menanyakan satu persatu apakah ada perubahan data dari data yang terakhir diberikan, misalnya pada pendataan sebelumnya ada KPM yang hamil dan pendataan berikutnya ternyata dia telah melahirkan atau sebaliknya serta anak sekolah yang mungkin telah naik kelas atau telah lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya maka harus didata ulang dimana selanjutnya ia sekolah.

Seluruh kegiatan yang menyangkut data KPM ini dilaksanakan dengan sangat baik di Kecamatan Bukit Kemuning. Kegiatan ini sangat penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Karena hasil dari kegiatan ini dapat menunjukkan keikutsertaan peserta untuk menyukseskan program tersebut dan melihat sejauh mana mereka memenuhi kewajibannya sebelum menerima bantuan.

3. Penyaluran bantuan

Penyaluran bantuan atau pembayaran dilakukan 4 tahap dalam setahun atau setiap bulan 3 bulan sekali, pembayaran dilakukan setelah pemutakhiran data dan verifikasi data karena pembayaran bantuan setiap tahapan bisa saja berbeda

sesuai hasil dari pemutakhiran dan verifikasi data yang dikumpulkan sebelum pembayaran.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pembayaran dilaksanakan dengan sangat baik dan bukan cuma acuan semata. Para KPM anggota PKH benar-benar memperoleh bantuan sebanyak empat kali dalam setahun dan jumlah bantuan sesuai dengan komposisi keluarga yang masuk dalam kategori penerima bantuan komitmen peserta dalam memenuhi persyaratan pendidikan dan kesehatan yang telah ditetapkan yaitu memenuhi kehadiran minimal 85%.

Apabila ada anggota keluarga dari KPM yang termasuk dalam kategori penerima bantuan dan tidak memenuhi komitmen kehadiran di sekolah ataupun di pusat kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Maka bantuan yang mereka terima akan berkurang atau bisa nol. Hal tersebut dilakukan sebagai sanksi bagi mereka yang tidak mau memenuhi kewajibannya dan sanksi tersebut bertujuan agar mereka tidak mengulangi hal yang sama pada tahap berikutnya sehingga dapat menerima bantuan tanpa ada pengurangan lagi. Jika mereka tidak diberikan sanksi maka bantuan ini tidak ada bedanya dengan bantuan lainnya seperti BLT dan tidak memberikan kesadaran bagi mereka untuk menjadi lebih baik dengan mengutamakan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka.

4. Kemudahan dalam Akses Pelayanan Dasar

Program Keluarga Harapan juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi KPM peserta Program Keluarga Harapan untuk mendapat akses terhadap pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Namun hal ini harus didukung

dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan di suatu wilayah. Kecamatan Bukit Kemuning merupakan suatu kecamatan di Kabupaten Lampung Utara yang memiliki banyak fasilitas pendidikan dan kesehatan. Di kecamatan Bukit Kemuning terdapat beberapa sekolah dasar yang tersebar di beberapa desa sehingga memudahkan masyarakat termasuk KPM untuk mengakses pendidikan dan juga terdapat fasilitas kesehatan karena terdapat posyandu dan puskesmas di setiap Desa serta Puskesmas di ibukota kecamatan dan satu rumah sakit umum.

Dengan didukung oleh banyaknya fasilitas kesehatan dan pendidikan, maka keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bantuan PKH dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan menggunakan kartu anggota PKH yang mereka miliki. Anak –anak mereka yang berprestasi di sekolah juga dapat diusulkan sebagai beasiswa dan apabila salah satu anggota keluarga sakit maka dengan adanya kartu peserta PKH maka mereka dapat memeriksakan diri di pusat pelayanan kesehatan dengan mudah bahkan penerima PKH juga akan didaftar sebagai penerima KIS sehingga mereka tidak akan terkendala dengan biaya pengobatan meski harus ke rumah sakit.

II. Manajemen Organisasi Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik pusat maupun di daerah. Pada pelaksanaannya PKH ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan melibatkan berbagai Kementerian

dan lembaga. Susunan tim pengendali program keluarga harapan mempunyai tugas dan fungsi. Sebagai berikut:

❖ **Pengarah**

- **Ketua** : Menko Kesra
- **Wakil ketua** : Menko Perekonomian
- **Anggota** : Mendagri, Meneg PPN/Kepala Bappenas
Mensos, Kepala BPS Mendiknas, Menkes, Meneg
Pemberdayaan Perempuan, Menkominfo,
Menakertrans.

❖ **Pengarah**

- **Ketua** : Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Kemenkokestra
- **Wakil I** : Dirjen Banjamsos Depsos
- **Wakil II** : Deputi Bidang Kemiskinan,
Ketenagakerjaan dan UKM Kemeg
PPN/Bappenas

Tugas dan Fungsi Tim Pengendali

• **Pengarah**

Manajemen Organisasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Memberikan pengarahan kepada pelaksana baik materi yang bersifat substantif maupun teknis guna keberhasilan pengendalian Program Keluarga Harapan.

- **Pelaksana**

- a) Menentukan Kriteria dan Daftar Penerima PKH
- b) Melakukan sosialisasi PKH ke berbagai kalangan di pemerintah dan masyarakat luas.
- c) Merumuskan konsep kebijakan operasional koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian PKH
- d) Mengevaluasi hasil manfaat dan dampak dari implementasi PKH terhadap pengurangan angka kemiskinan
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKH serta melaporkan hasil kepada Menteri Koordinasi Bidang Kesra
- f) Mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektifitas pelaksanaan PKH kepada pengarah.

Tim Pengendali Pusat

- a. Kementerian PPN/Bappenas
- b. Departemen Kesehatan
- c. Departemen Pendidikan
- d. Departemen Sosial
- e. Departemen Agama
- f. Departemen Keuangan

- g. Departemen Dalam Negeri
- h. Kementerian Komunikasi Dan Informasi
- i. Biro Pusat Statistik (BPS)

Pelaksana PKH Pusat (PPKH-P)

- a. Pegawai Depsos
- b. Tim Asistensi
- c. Tenaga Ahli
- d. Praktisi/narasumber
- e. Tenaga Operator Komputer Dan Technical Support

Tugas dan tanggung Jawab PPKH Pusat

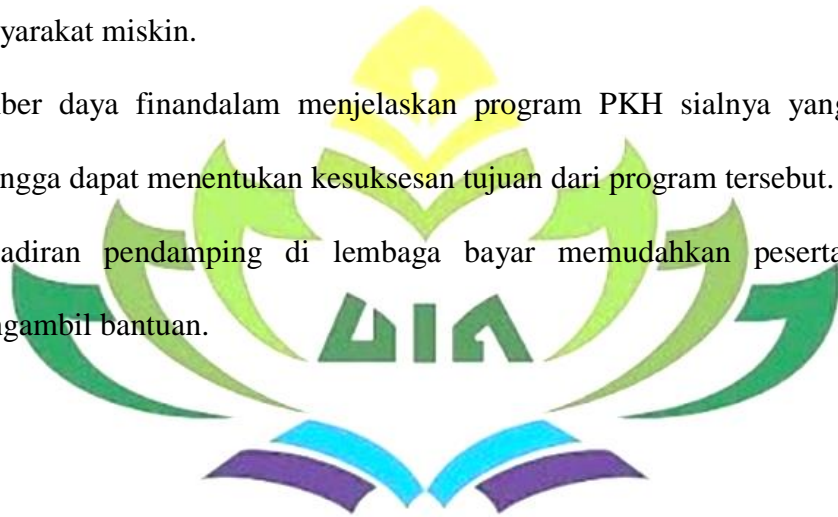
- a. Mengelola dan melaksanakan pembayaran
- b. Mengelola dan melaksanakan registrasi peserta PKH
- c. Verifikasi kelayakan peserta PKH
- d. Koordinasi dengan Pemda Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan
- e. Mengelola Keuangan
- f. Memonitor pelaksanaan PKH
- g. Menyusun berbagai laporan
- h. Menjamin proses dan ketetapan waktu sosialisasi
- i. Menyelenggarakan dan mengelola pelatihan
- j. Mengembangkan mekanisme penyelesaian pengaduan

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara

1. Faktor Pendukung

- a) seluruh pihak-pihak yang terkait ikut mengawasi kelancaran dari program tersebut.
- b) Dinas Sosial berperan aktif melakukan koordinasi bulanan dengan pendamping/operator.
- c) Masih mudahnya mengumpulkan masyarakat saat pertemuan awal dan pertemuan kelompok.
- d) Semangat dan antusias masyarakat penerima PKH sangat tinggi saat dilakukannya pencairan dana PKH.
- e) Pendamping berperan aktif memfasilitasi KPM untuk berkomitmen dalam pendidikan dan kesehatan.
- f) Pendamping melakukan pemutakhiran data setiap ada perubahan data anggota keluarga peserta PKH.
- g) Operator menyediakan data yang dapat memudahkan aktivitas verifikasi yang dilakukan oleh pendamping.
- h) Operator melakukan rekapitulasi hasil rekonsiliasi penyaluran bantuan.
- i) Rekapitulasi hasil pemuktahiran data yang di buat operator cukup memudahkan jalannya program PKH.
- j) KPM selalu memberikan informasi kepada pendamping saat melahirkan.
- k) Peserta/KPM mengetahui jadwal pengambilan bantuan setiap tahap

- l) Lembaga bayar menyalurkan bantuan tepat jumlah.
- m) Semangat para pendamping yang masih bertahan untuk tetap mendampingi walaupun tidak terlalu intents.
- n) Ruang sekretariat PPKH yang di sediakan Dinas Sosial nyaman untuk bekerja.
- o) Adanya komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengsucceskan PKH guna membantu memutus rantai kemiskinan ditingkat masyarakat miskin.
- p) sumber daya finansial dalam menjelaskan program PKH sialnya yang cukup sehingga dapat menentukan kesuksesan tujuan dari program tersebut.
- q) Kehadiran pendamping di lembaga bayar memudahkan peserta dalam mengambil bantuan.



2. Faktor Penghambat

- a) pada saat awal pelaksanaan daya tangkap dari masyarakat miskin sebagai penerima bantuan masih banyak yang kurang memahami bantuan PKH
- b) masyarakat penerima bantuan masih ada beberapa yang agak sulit untuk di ajak berkoordinasi dan daya partisipasi masyarakat masih rendah
- c) faktor konflik yang terjadi antara individu, sering kali terjadi kecemburuan sosial antara peserta penerima PKH sebab masyarakat yang awam tidak

mengerti apasaja kategori syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian sosial.

- d) masalah pencairan dana masih banyak KPM yang belum mengerti prosedur pengambilan dana melalui kartu ATM dari Bank Penyalur.
- e) pendamping PKH seringkali kesulitan untuk menjelaskan P kepada para peserta PKH dikarenakan setiap 1 orang pendamping PKH mendampingi 4 desa yang kurang lebih terdapat 300-350 PKH.
- f) Peserta PKH belum mengetahui jumlah bantuan yang akan diterima pada setiap tahap.
- g) Ada beberapa operator yang belum menyediakan data verifikasi untuk pendamping.
- h) Masih terdapat sarana prasarana sekolah yang belum memadai
- i) Masih terdapat fasilitas peralatan kesehatan yang belum mendukung peserta PKH untuk memeriksa kesehatannya.
- j) Lembaga bayar belum cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan permasalahan penyaluran bantuan yang terjadi.
- k) Ada beberapa pendamping tidak membuat laporan pemutakhiran data setiap bulan sehingga tidak ada fungsi kontrol terhadap perubahan data peserta PKH dampunganya.
- l) Peserta PKH tidak memberikan informasi kepada pendamping saat melahirkan atau pindah tempat tinggal.
- m) Kondisi akses jalan antara rumah KPM dan lembaga bayar sulit di lalui.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi PKH di Bukit Kemuning sudah berjalan dengan cukup baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, validasi, pendampingan pencairan bantuan, pemutakhiran data, dan verifikasi komitmen peserta PKH serta adanya sanksi yang cukup jelas dan tegas bagi KPM yang tidak memenuhi komitmennya, proses seleksi dan penetapan program hanya dilakukan ditingkat nasional antara *stakeholder* terkait (Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Kota Walikota Lampung Utara, dll). PPKH Kabupaten Lampung Utara hanya menjalankan tugas dan kewajiban dan fungsi yang dimandatkan oleh PPKH dari Pusat yang dalam hal ini langsung dari Kementrian Sosial.
2. Faktor pendukung adanya dukungan koordinasi dari pihak-pihak yang terkait dalam implementasi PKH di Kecamatan Bukit Kemuning juga antusias para peserta PKH, peran pendamping PKH merupakan aktor yang sangat penting. Faktor penghambat pada awal pelaksanaan daya tangkap dari masyarakat miskin sebagai penerima bantuan masih kurang, penerima bantuan cenderung agak sulit untuk di ajak berkoordinasi dan partisipasi masyarakat masih rendah, konflik yang terjadi antara individu. Dari keterangan pandamping

PKH di desa bukit Kemuning, masyarakat disana banyak yang kurang paham terhadap program tersebut.

B. Saran

1. Dalam hal ini penulis menyarankan yaitu peran pendamping terus ditingkatkan. Begitu juga peran dari peserta PKH diharapkan untuk tetap semangat, serius, cepat beradaptasi, serta meningkatkan peran aktifnya dalam proses berjalannya program diskusi maupun pertemuan lain yang sifatnya mendukung.
2. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) ada dalam peran pendamping dalam menjalankan tugas hendaknya tanpa pamrih, mau berkorban kepada masyarakat dan ikhlas, baik dalam situasi dan lokasi lingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif.
3. Peran pemerintah daerah diharapkan memberikan motivasi kepada KPM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak yang baik bagi generasi selanjutnya. Koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak terkait juga menjadi faktor yang terwujudnya tujuan dari implementasi program PKH.
4. Peneliti menyarankan kepada seluruh petugas pkh di Kabupaten Lampung Utara khusus nya di Kecamatan Bukit Kemuning dari setiap bidang untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang pkh kemasyarakat luas agar mereka paham dan tidak terjadi kecemburuan sosial terhadap orang yang benar-benar berhak menerima bantuan pkh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: RinekaCipta, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008).
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1985).
- Husain Usman, PurnomoStiady, Amar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Irawan, Prastya, *Logika dan Prosedur Penelitian* (Jakarta: Setiawan Pers, 1999).
- Kadir, Muhammad Abdul *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Koentjarningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997)
- Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005)
- Mulyasa, E, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi* (Bandung: Rosda Karya, 2002).
- Narbuko, Choliddan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).
- P. Todaro, Michael dan C. Smith, *Sthepan Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*, Jakarta: Erlangga, 2003
- Saptono, *Sosiologi Politik* (Semarang: Phibeta Aneka Gama, 2006).
- Soeratno dan Lincollin Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Lima*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008).

Soimin, Wisnu Indrajid VO, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutuskan Mata Rantai Kemiskinan)*(Malang: Intrans Publishing,2014).

Sugiyono, *Medote penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014

Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alvabeta, 2008.

Suharto, Edi *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*,Bandung Refika Aditama, 2005

Tim penulis, *KBBI edisi 7* (Jakarta: Gramedia 2008).

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik*.Malang,Bayumedia Publishing, 2007

Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA,2007

SUMBER HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1

Undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Jakrta, kementrian dalam negeri.

SUMBER JURNAL

Buku Saku Pendamping PKH oleh Kementrian Sosial RI Tahun 2017

Jurnal Dialog Kebijakan Publik, *Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respons Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya*,(Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 8 Desember 2012)

Lampung Dalam Angka 2018. BPS Provinsi Lampung 2018

Laporan Akhir Evaluasi Program Perlindungan Sosial : Program Keluarga Harapan. Bappenas 2018

Suryawati, Chiswardini, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol.08/No.03/september/2005

SUMBER INTERNET

<https://lampungutarakab.bps.go.id/statictable/2015/04/29/19/jumlah-penduduk-lampung-utara> diakses 18 November 2018

<https://pkhpatampanua.wordpress.com/2017/11/14/pertemuan-awal-dan-validasi-data-calon-peserta-pkh-tahun-2017/> diakses 31 des 2018

<https://lutfianto22.wordpress.com/bantuan-langsung-tunai/> diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.

www.bps.go.id diakses 13 November 2018

www.kemsos.go.id/unduh/UU-kesos-No112009.pdf diakses 16 November 2018





Lampiran – Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Let. Kol.H. EndroSuratminSukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

Daftar Pedoman Wawancara

Berikut ini panduan wawancara tidak terstruktur yang akan menjadi acuan peneliti di lapangan:

A. Peserta PKH

Nama Responden :

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara :

1. Apakah ibu mengetahui program PKH?
2. Bagaimana Sosialisasi Program PKH?
3. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh petugas PKH kepada peserta PKH?
4. Apa saja program PKH untuk KPM?
5. Bagaimana proses pencairan dana PKH kepada KPM/Peserta PKH? Dan digunakan apa saja dana tersebut oleh peserta PKH?
6. Apa sajakah perubahan yang dirasakan Peserta setelah mendapat program PKH?
7. Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh program keluarga harapan?

8. Bagaimana kegiatan Pendidikan Para Peserta PKH?
9. Bagaimana Kegiatan Posyandu/Kesehatan Para Peserta PKH?
10. Bagaimana respon para KPM terhadap Program bantuan ini?





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Let. Kol.H. Endro SuratminS ukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

Daftar Pedoman Wawancara

B. Koordinator dan Operator PKH

Nama Responden :

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara :

1. Apakah telah dilakukan sosialisasi terkait Program Keluarga Harapan Khususnya di kecamatan Bukit Kemuning?
2. Kapan dilaksanakan PKH di Kecamatan Bukit Kemuning?
3. Berapa jumlah peserta PKH di Kecamatan Bukit Kemuning?
4. Tujuan mana sajakah yang paling mudah dicapai?
5. Apakah pelayanan yang di berikan berdampak jelas kepada KPM?
6. Bagaimana SOP yang digunakan sebagai petunjuk pelaksana PKH khususnya di Kecamatan Bukit Kemuning?
7. Siapa yang di tunjuk sebagai koordinator dalam pelaksanaan PKH khususnya di Kecamatan Bukit Kemuning?
8. Bagaimana jadwal kegiatan PKH di Kecamatan Bukit Kemuning?
9. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan ?
10. Berapa Jumlah bantuan yang di terima?

11. Apakah penyaluran bantuan turun tepat waktu ?
12. Hambatan- hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program PKH?





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let. Kol.H. Endro SuratminS ukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

C. Pendamping PKH

Nama Responden :

Tanggal wawancara :

Waktu Wawancara :

1. Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang PKH di Kecamatan Bukit Kemuning?
2. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Bukit Kemuning?
3. Apasaja tugas para pendamping PKH?
4. Seperti apa proses pendataan peserta awal PKH?
5. Bagaimana SOP yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan PKH?
6. Apakah faktor penghambat dan pendukung PKH di Kecamatan Bukit Kemuning?
7. Berapa jumlah bantuan yang diterima peserta PKH?
8. Bagaimana respon penerima bantuan PKH terhadap bantuan yang sudah di berikan?
9. Apakah pelayanan yang diberikan kepada KPM berdampak jelas?

10. Apakah staf yang terlibat didalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung?
11. Apakah staf yang terlibat diberikan pembekalan mengenai pendampingan?
12. Apa latar belakang pendidikan para pendamping ?
13. Tujuan-tujuan mana sajakah yang paling mudah dicapai?





KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

**TRANSKIP WAWANCARA (JUM'AT 16 NOVEMBER 2018 PADA PUKUL
13.30 DI KANTOR SEKREKTARIAT PPKH KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**

a. Identitas Informan

Nama : Alexander
Jenis kelamin : laki-laki
Umur : 35 Tahun
Jabatan : Koordinator Kabupaten Lampung Utara
Alamat : Kotabumi Lampung Utara

b. Hasil wawancara

Peneliti : Tahun berapa kah PKH di laksanakan dilampung utara?

Alex : Masuk PKH dilampung utara pada tahun 2012 dahulu hanya beberapakota saja yang dapat bantuan ini tapi sekarang sudah disama ratakan pada setiap kabupaten bahkan hampir 10juta jiwa penerima PKH bahkan tadinya ingin di genjot 15juta jiwa hanya saja belum tercover oleh kemensos.

Peneliti : Apakah dengan adanya PKH ini bisa mengentaskan kemiskinan?

Alex : Tentu saja bisa kenapa, karena program ini adalah program unggulan program dunia bukan hanya di indonesia namun bahasanya saja yang berbeda PKH ini bantuan tunai bersyarat berbeda dengan BLT loh” BLT jamannya SBY hanya menerima uang setelah itu terserah maudiapain aja terserah.

Peneliti : Bagaimana mekanisme seleksi dan penetapan lokasi pkh?

Alex : kalo untuk seleksi dan penetapan lokasi itu langsung dari kemensos yang menangani dan berkerjasama dengan BPS, kecamatan, serta kelurahan yang merujuk dari data sensus. tentunya pak walikota setempat yang memang setuju

program pkh ini dilaksanakan didaerah tersebut. Dan melihat kondisi masyarakat ataupun daerah tersebut masih berhak menerima bantuan PKH

Peneliti : apakah yang dimaksud dengan verifikasi komitmen?

Alex : Verifikasi komitmen peserta maksud nya adalah ketika calon sudah dinyatakan sah sebagai peserta PKH mereka harus menjalani komitmen yang telah di tentukan misalnya ketika ada pengecekan ulang ke kesekolah atau ke puskesmas mereka harus rutin menjalankan komitmen tersebut seperti halnya anak para KPM harus rajin kesekolah dilihat oleh data absensi siswa dan ibu hamil harus rajin melakukan posyandu jika mereka tidak melakukan itu maka bisa saja antuannya di pending. Apabila kejadian ini terulang selama tiga bulan maka bantuan Program PKH akan dicabut dan bisa jadi dia tidak akan mendapat bantuan lagi itu sanksi yang di berikan kepada peserta yang tidak komitmen

Peneliti : apakah yang dimaksud dengan pemutakhiran data?

Alex : pemutakhiran adalah data yang sudah ada di cocokan dengan kondisi KPM pada saat itu misalnya KPM saya bilang kalau dirinya sedang hamil kita perlu bukti dari bidan jika benar dia sedang hamil maka dia perlu mengumpulkan fotocopy berkas tanda bukti kehamilan dari bidan kemudian data tersebut diajukan ke operator untuk di mutakhirkan baru seelah itu ada perubahan atau penambahan dari KPM tersebut. Pemutakhiran ini biasanya dilakukan sebelum pencairan dilaksanakan disitu pendamping meencoba mengupdate data terbaru

Peneliti : Tujuan –tujuan mana sajakah yang paling mudah dicapai ?

Alex : Pastinya terutama yaitu pendidikan dan kesehatan anak-anak merekasebab keduanya adalah sasaran pokok program PKH tentunya tidakterlepasdari perhatian pendamping sebagai pelaksana terdepan dalam program ini serta dukungan positif pemerintahan dalam program ini.

Peneliti : Apakah pelayanan yang diberikan kepada penerima PKH sudah maksimal?

Alex : Sebagai pendamping mereka punya kewajiban untuk mengarahkan KPM mereka masing-masing baik itu pada saat pemuktakhiran data, pertemuan kelompok juga kesempatan dalam komunikasi dengan para KPM pun menjadi proses perhatian khusus demi tercapainya tujuan PKH bukan hanya saat pelaksanaan pencairan bantuan saja.

Peneliti : Bagaimana respon para KPM terhadap Bantuan PKH ini?

Alex : Kalo yang saya dengar curhatan dari para pendamping mau pun KPMnya langsung “alhamdulillah mereka sangat senang dan bersyukur sekali dengan adanya bantuan ini mereka merasa lega dapat pendidikan anak-anak mereka baik begitu juga dengan bantuankesehatan yang mereka dapat banyak masyarakat berpendapat untuk terus melanjutkan program yang bagus ini.

Peneliti : Apasaja hambatan yang sering di temukan kan ketika pelaksanaan program PKH?

Alex : Untuk hambatan saya rasa kalo dari kami alhmdulilah bisa dikatatidak ada karena kami hanya menjalankan perintah dari pusat bisa diibaratkan kami hanyalah penyambung lidah dari kementrian sosisalhanya saja terkadang masalahnya adalah di masyarakatnya sendirimasih banyak dari mereka sendiri yang masih menganut budaya mengaku miskin padahal PKH ini adalah program bantuan bersyarat.

Peneliti : Apakah staf yang terlibat didalam pelaksanaan program PKH sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung?

Alex : Sejauh ini yang saya amatin para staf dan pendamping dapat menyelesaikan tugasnya dan menhandle semua masalah yang ada dengan baik dan dengan cara mereka masing-masing harus sanggup dong kalo gak sanggup mengundurkan diri saja jadi pendamping atau staf PKH.



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarama I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

**RESUME TRANSKIP HASIL WAWANCARA (Minggu, 18 NOVEMBER 2018
PADA PUKUL 13.30 DI KANTOR SEKREKTARIAT PPKH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA)**

a. Indentitas Informan

Nama	: Dedy Sulaiman
Jenis kelamin	: laki-laki
Umur	: 30 Tahun
Jabatan	: Koordinator Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara
Alamat	: Bukit Kemuning

b. Hasil Wawancara

Peneliti	: Apakah telah dilaksanakan sosialisasi terkait Program PKH di Kecamatan Bukit Kemuning?
Dedy	: Sosialisasi, otomatis sudah dilaksanakan sejak tahun di 2012 sesuai data yang ada.
Peneliti	: Berapakah jumlah peserta PKH di Kecamatan Bukit Kemuning?
Dedy	: Kalo Tahun sekarang 2100 sekian tahun 2012 Cuma 663 di tahun 2015 kurang lebih 700 KPM tahun 2016 nambah sedikit 300 sekian nah ditahun 2018 ini agak banyak nambahnya sekitar 800 jadi totalnya 2100 lebih sedikit.
Peneliti	: Bagaimana proses pencairan dana pkh?
Dedy	: Sebelum waktu pencairan para pendamping melakukan pertemuan kelompok terlebih dahulu memproses ulang kembali betul atau tidaknyanya mereka adalah penerima program keluarga harapan tersebut yang sebelumnya pernah dilakukan validasi. Proses dari validasi ke

pencairan pertama PKH itu kurang lebih tiga bulan setelah validasi.

Peneliti : Apakah tujuan di laksanakan PKH di Bukit Kemuning?

Dedy : Kalo masalah tujuan kita ngikutin ketentuan pusat dengan ada jangka pendek dan ada jangka panjangnya kalo jangka pendeknya dia disegi kesehatan KPM itu harus hidup sehat hidup bersih dan rata-rata mereka ini mendapatkan kartu KIS jadi kalo mau berobat sudah tidak bayar lagi gratis.

Peneliti : Siapakah sasaran PKH?

Dedy : Sasarannya adalah Keluarga yang berdasarkan kategori karena tersendiri PKH ini adalah bantuan bersyarat nah tahun 2012 waktu itu kategorinya baru 3 ibu hamil balita, SD dan SMP 2014 nambah satu kategori nya nambah 1 SMA 2018 nambah 2 lagi kategorinya yaitu Lansia dan penyandang disabilitas.

Peneliti : Adakah hambatan yang sering di jumpai ketika terjun melaksanakan program PKH?

Dedy : Kalo yang saya dengar curhatan dari para pendamping mau pun KPMnya langsung “alhamdulillah mereka sangat senang dan bersyukur sekali dengan adanya bantuan ini mereka terasa lega dapat pendidikan anak-anak mereka baik begitu juga dengan bantuan kesehatan yang mereka dapat banyak masyarakat berpendapat untuk terus melanjutkan program yang bagus ini.

Peneliti : Apasaja hambatan yang sering di temukan ketika pelaksanaan program PKH?

Dedy : Kalo hambatan sih ada ya biasanya bukan dari peserta PKH kayak protes masyarakat sekitar yang gak dapet bantuan ini ngehubungin terus dateng kerumah udah kita bilang “kita ini bukan mendata pak..buk.. jadi walaupun ibu ngasih data ke saya tidak ada jaminan dapet bantuan apa gaknya terkadang ada yang bilang si A si B sudah mampu kok dapet bantuan terus hambtannya ini kebanyakan ibu-ibu beberapa yang menjadi Tkw kadang ATM nya ditinggal sama anak atau keluarganya yang jadi hambatan itu ketika PIN nya keblokir sama

anaknya setelah di proses di bank mandiri ternyata tidak boleh diwakilihkan yang bersangkutan datang dan mengurusnya sedangkan ibunya Tkw tidak mungkin pulang hanya ingin mengurus atm yang terblokir kaya KPM saya kemaren begitu jadi kemarin saya kebank tetep aja gak di ladinin sama pihak banknya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (Minggu, 18 NOVEMBER 2018 PADA
PUKUL 13.30 DI KANTOR SEKRETARIAT PPKH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA)**

a. Identitas Informan

Nama : Risnani
Jenis kelamin : Wanita
Umur : 32 Tahun
Jabatan : pendamping Bukit Kemuning Lampung Utara
Alamat : Tanjung Baru

b. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah sudah dilaksanakan sosialisasai PKH di kecamatan bukit kan kemuning? dan bagaimana sosialisasinya?

Risnani : Ow sudah dari awal datangnya PKH tahun 2012 kami sudah melaksanakan sosialisasi tentang PKH. Pertama dari dinsos dulu ya udahnya turun ke kades-kadesnya terus itu kita langsung terjun kemasyarakatnya setelah data sudah di terima kami lakukan validasi.

Peneliti : Siapakah yang bertanggung jawab untuk program PKH di kecamatan bukit kemuning?

- Risnani : Ya yang jelas kita ke dinsos dulu tapi yang pertama sekali adalah kemensos kalo kita patokannya kemensos gak ada aparat desa jajarannya.
- Peneliti : Bagaimana proses pembentukan kelompok?
- Risnani : Kalo pembentukan ketua kelompok mereka musyawarah terlebih dahulu, siapa-siapa yang aja yang mau jadi ketua nanti kita kasih pengarahan dan calon ketua mampu mengkoordinir dan diusahaan ketua punya motor dan hp.
- Peneliti : Apasaja tugas pendamping PKH?
- Risnani : Yang pertama yaitu tadi sosialisasi, memvalidasi, pertemuan kelompok, memutakhirkan data yang dilakukan 3 bulan sekali.
- Peneliti : Apakah pelaksanaan PKH di sesuaikan dengan SOP yang telah di tetapkan kemensos?
- Risnani : Oww ya jelas kami mengikuti peraturan yang ada tetapi secara teknis bagaimana cara nya kita harus melakukan dengan baik dan benar sesuai kondisi masyarakatnya.
- Peneliti : Adakah kendala yang didapat ketika melaksanakan program pkh ini?
- Risnani : Kendala tentu ada terkadang dari aparat desa dan masyarakat yang belum mengerti tentang PKH itu bagaimana seperti tadi mereka tidak tau kalo sebenarnya pkh itu bersyarat taunya merekanya “ah.. saya miskin” harus dapat pkh tapi nyatanya tidak begitu untuk orang miskin tapi bersyarat contohnya si A miskin punya anak balita/anak sekolah/lansia dan disabilitas seperti itu syarat atau kategori bantuan penerima pkh.
- Peneliti : Berapakah jumlah bantuan yang diterima KPM?
- Risnani : itu sesuai kategori yang di dapat kalo dulu SD 500ribu kalo SMP 700ribu balita 1juta kalo dulu hanya 3 kategori tapi sekarang mulai tahun 2016 SMA mulai masuk kategori 2018 nambah lagi untuk lansia dan disabilitas.
- Peneliti : Adakah sanksi jika KPM tidak mengikuti aturan?
- Risnani : Jelas ada untuk KPM yang biasa tidak ikut perkumpulan atau tidak komitmen dalam menjalankan bantuan ini

contohnya jika anak mereka ketahuan bolos sekolah selama 3hari berturut-turut dilihat dari data absen maka bantuan pkhnya akan dipending bahkan ada yang tidak dapat gitupun ibu hamil jika tidak rajin cek kebidan ataupun balita yang tidak rajin posyandu.





KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (Minggu, 18 NOVEMBER 2018 PADA
PUKUL 13.30 DI KANTOR SEKREKTARIAT PPKH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA)**

a. Identitas Informan

Nama : Nisar
Jenis kelamin : Wanita
Umur : 41 Tahun
Jabatan : Peserta PKH (KPM) Bukit Kemuning Lampung Utara
Alamat : Tanjung Baru

b. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah ibu mengetahui apa itu program PKH?

Nisar : Bantaun budak (anak) sekolah tueh (bahasa ogan) alhmdulilah dapat aku.

Peneliti : Apakah manfaat yang ibu rasakan ketika mendapat bantuan pkh?

Nisar : Ya untuk kebutuhan budak (anak) sekolah beli bajunye, sepatunye terbantu nian adanya bantuan ini pajak bayah biaye anak sekolah agak meringankan bebankulah untuk tambah-tambahan pule.

Peneliti : Apakah ibu sering ikut kegiatan PKH?

Nisar : Oww.. kumpul-kumpul tu ye ha'ah mikut aku hadir terus aku kalo kumpulan gak pernah tinggal

Peneliti : Bagaimana cara ibuk untuk mengambil dana bantuan PKH?

Nisar : Ke bank lewat ATM ngambek di bank (ngambil di bank) udah bisa sekarang kalo dulu belum bisa suruh suhada (pendamping) ni lah minta tolong kasih tau cara ngambil.

Peneliti :Bagaimana perasaan ibu adanya bantuan ini?

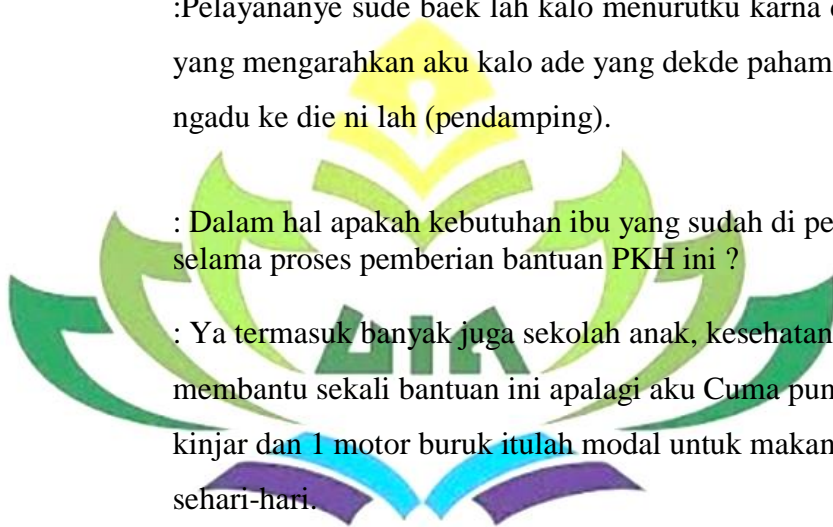
Nisar : Yaa.. alhmdulilah terima kasih sama pemerintah dapat bantuan agak ringanlah saya untuk ngucupi keperluan anak sekolah.

Peneliti :Apakah staf atau pendamping PKH menjalankan tugasnya dengan baik?

Nisar :Pelayananye sude baik lah kalo menurutku karna die nilah yang mengarahkan aku kalo ade yang dekde paham aku ngadu ke die ni lah (pendamping).

Peneliti : Dalam hal apakah kebutuhan ibu yang sudah di penuhi selama proses pemberian bantuan PKH ini ?

Nisar : Ya termasuk banyak juga sekolah anak, kesehatan, sangat membantu sekali bantuan ini apalagi aku Cuma punya 1 kinjar dan 1 motor buruk itulah modal untuk makan sehari-hari.





KEMENTRIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA (Senin, 19 NOVEMBER 2018 PADA
PUKUL 13.30 DI KANTOR SEKREKTARIAT PPKH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA)**

a. Identitas Informan

Nama : Rika
Jenis kelamin : Wanita
Umur : 35 Tahun
Jabatan : Peserta PKH (KPM) Bukit Kemuning Lampung Utara
Alamat : Tebing Kimpul

b. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah ibu mengetahui apa itu program PKH?

Rika : Iya sedikit paham bantuan pendidikan dan kesehatan itu kan saya kebetulan dapet yang kategori anak SMP dan Ibu hamil karena anak saya yang pertama sudah SMP dan saya sedang hamil 4 bulan mba.

Peneliti : Apakah manfaat yang ibu rasakan ketika mendapat bantuan pkh?

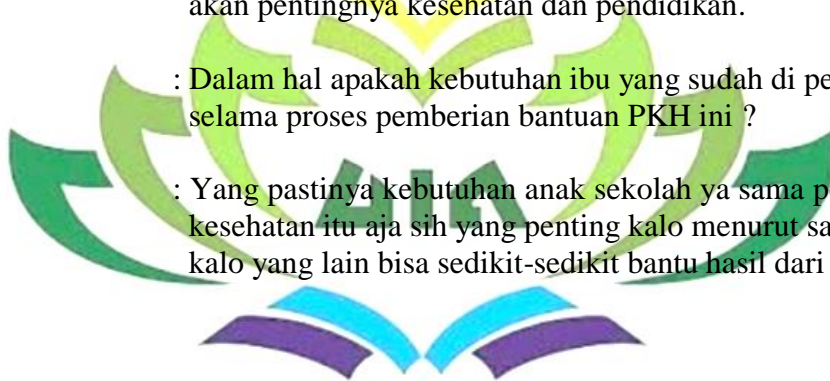
Rika : Alhamdulillah ada beberapa walaupun gak banyak tapi saya terbantu dari bisa bayar biaya anak sekolah kalo masih ada lebihnya saya belikan buku dan sepatu untuk anak saya dan bisa beli susu dan vitamin ibu hamil.

Peneliti : Apakah ibu sering ikut kegiatan PKH?

Rika : Kalo saya hampir ikut terus pertemuan kelompokan wajib karena kalo 3kali tidak datang katanya bantuannya di hapus.

Peneliti : Bagaimana cara ibuk untuk mengambil dana bantuan PKH?

- Rika : Saya ke bank mandiri trus gesek ke atm kaya kitaorang biasaambil duit gitu deh mbak
- Peneliti : Bagaimana perasaan ibu adanya bantuan ini?
- Rika : Seneng banget bersyukur alhamdulillah terbantu sekali adanya bantuan ini semoga di perpanjang terus yaa..
- Peneliti : Apakah staf atau pendamping PKH menjalankan tugasnya dengan baik?
- Rika : pendamping kami benar-benar memperhatikan kami, mereka tidak segan berbaur dengan rakyat kecil seperti kami, mereka melakukan tugasnya dengan baik sehingga kami para peserta program dapat menerima bantuan kami sesuai ketentuan. Jika terjadi kesalahan, maka mereka akan mencari jalan keluarnya agar kami tetap bisa menerima bantuan. Mereka selalu mengingatkan kami akan pentingnya kesehatan dan pendidikan.
- Peneliti : Dalam hal apakah kebutuhan ibu yang sudah di penuhi selama proses pemberian bantuan PKH ini ?
- Rika : Yang pastinya kebutuhan anak sekolah ya sama pelayanan kesehatan itu aja sih yang penting kalo menurut saya kalo yang lain bisa sedikit-sedikit bantu hasil dari kebon





KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarama I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (Kamis, 6 Desember 2018 PADA
PUKUL 13.30 DI KANTOR SEKREKTARIAT PPKH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA)**

a. Identitas Informan

Nama : Lespita
Jenis kelamin : Wanita
Umur : 30 Tahun
Jabatan : Peserta PKH (KPM) Bukit Kemuning Lampung Utara
Alamat : Dwikora

b. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah ibu mengetahui apa itu program PKH?

Lespita : iya kalo gak salah program bantuan dari pemerintah untuk anak sekolah, ibu hamil/balita, penyandang disabilitas dan lansia itu dek.

Peneliti : Apakah ibu sangat terbantu dengan adanya program PKH?

Lespita : iya terbantu lah dek alhamdulillah bisa menutupi kebutuhan yang kurang ya sedikit bisa nabung buat beli susu ibu hamil.

Peneliti : dari dua kategori pendidikan dan kesehatan manakah yang ibu sangat rasakan manfaatnya?

Lespita : kalo menurutku keduanya sangat terasa soalnya anakku yang pertama sudah SD dan sekarang sedang hamil 6 bulan juga.

Peneliti : Kebutuhan apasaja yang belum terpenuhi dari program PKH ini?

Lespita : kalo saya sih alhamdulillah sudah mencukupi mbak untuk kesehatan dan pendidikan keluarga saya

Peneliti : apa harapan ibu untuk program PKH ini untuk selanjutnya?

Lespita : harapan saya semoga program ini jalan terus makin sukses.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

TRANSKIP HASIL WAWANCARA (Kamis, 6 Desember 2018 PADA PUKUL 13.30 DI KANTOR SEKREKTARIAT PPKH KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

a. Identitas Informan

Nama : Mujiati
Jenis kelamin : Wanita
Umur : 39 Tahun
Jabatan : Peserta PKH (KPM) Bukit Kemuning Lampung Utara
Alamat : Dwikora

b. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah ibu mengetahui apa itu program PKH?

Mujiati : auu pacak titu bantuan anakku sekolah lah dari tahun 2014 aku dapat mak ini anakku lah SMA kelas satu

Peneliti : Apakah manfaat yang ibu rasakan ketika mendapat bantuan pkh?

mujiati : Alhamdulillah pacak bayar spp anakku kemahi ade yang demam pakai kartu bantuan titulah dekdek mbayah agi kite besyukur benah aku dapat bantuan ini

Peneliti : Apakah ibu sering ikut kegiatan PKH?

Mujiati : auu khapat ige aku milu ape saje ku ikuti kegiatan kande silahturami sesame KPM biar akrab dan ada kegiatan.

Peneliti : biasanya di adakannya kapan bu kegiatannya?

Mujiati : biasanya tu sore karena kalau pagi kami biasanya pada kekebon atau dagang di pasar impres

Peneliti : Bagaimana cara ibu untuk mengambil dana bantuan PKH?

Mujiati juga : ya kebank mandiri biasanya saya suruh anak saya kalo repot soalnya antrinya lama dan panjang.

Peneliti : Bagaimana perasaan ibu adanya bantuan ini?

Mujiati : Senang bersyukur alhamdulillah bisa menutupi kekurangan kalau bisa diperpanjang terus karna buat anak sekolah sama kesehatan paling penting itu kalau aku.





KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA (Kamis, 6 Desember 2018 PADA
PUKUL 13.30 DI KANTOR SEKREKTARIAT PPKH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA)**

a. Identitas Informan

Nama : Asmawati
Jenis kelamin : Wanita
Umur : 57 Tahun
Jabatan : Peserta PKH (KPM) Bukit Kemuning Lampung Utara
Alamat : Muaraaman

b. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah ibu mengetahui apa itu program PKH?

Asmawati : iyo tau aku bantuan untuk orang tua kaya aku ini bantuan lansia

Peneliti : Apakah manfaat yang ibu rasakan ketika mendapat bantuan pkh?

Asmawati : ya bisa bantu keperluan sehari-hari bahan pokok aku bisa beli susu juga Alhamdulillah kemaren juga sempat dirawat dirumah sakit aku gak dimintain duit bayar pake kartu.

Peneliti : Apakah ibu sering ikut kegiatan PKH?

Asmawati : iya kalo badan sehat aku ikut tapi kalo kurang sehat jarang ikut kalo pertemuan kelompok wajib ikut.

Peneliti : Bagaimana cara ibu untuk mengambil dana bantuan PKH?

Asmawati : kebank mandiri di antar anak saya tapi kadang juga menantu saya yang ambilkan

Peneliti : Bagaimana perasaan ibu adanya bantuan ini?

Mujiati : Jujur bersyukur sekali alhamdulillah pemerintah masih mau peduli dengan orang-orang tua atau lansia seperti saya semoga pkh ini bisa lanjut terus semakin jaya itu

harapan saya karena tujuannya mulia mebantu rakyat kecil.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarama I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)

703289

Dokumentasi Wawancara Penelitian



Penelitian di kantor dinas sosial Kabupaten Lampung Utara



wawancara dengan bang alexander selaku Koordinator Kabupaten Lampung utara



Sedang melakukan pemutakhiran data di kantor sekertariat PPKH di Kabupaten Lampung Utara



Wawancara mendalam dengan bang suhada selaku pendamping PKH Kecamatan Bukit Kemuning



Kantor Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara



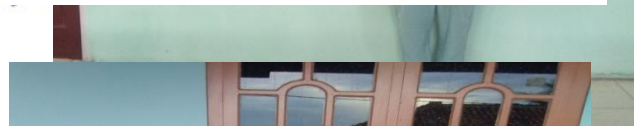
Wawancara mendalam dengan ibu risnani selaku pendamping PKH Kecamatan Bukit Kemuning



Stiker Semboyan PKH



Wawancara Ibu Nisar selaku peserta PKH di Kecamatan Bukit Kemuning



Kantor Sekretariat Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Utara



Wawancara dengan ibu Eka dan sukarsih selaku peserta PKH di Kecamatan Bukit Kemuning

